

PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR KODING

1. Berita yang akan diteliti adalah berita mengenai kasus korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di surat kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar. Perhatikan 8 berita yang dipilih peneliti untuk penelitian. Baca dengan cermat.
2. Peneliti melampirkan 12 konstruk kategori dan perhatikan pula satuan analisis yang digunakan masing-masing konstruk kategori. Unit analisisnya adalah “paragraf” untuk konstruk kategori faktualitas, kemampuan untuk dicek kembali (*checkability*), verifikasi fakta dan “berita” untuk konstruk kategori kekayaan informasi (*readability*), kepadatan isi berita (*density*), sudut pandang yang ditampilkan (*breadth*), kedalaman isi berita (*depth*), keberadaan saksi mata (*eye witness comparisons*), kelengkapan unsur berita, *reference*, *relative salience* dan penempatan berita (*relative priority*).
3. Faktualitas alat ukurnya paragraf fakta, opini, campuran fakta dan opini, dan bukan fakta bukan opini.
4. Kemampuan untuk dicek kembali (*checkability*) alat ukurnya paragraf dapat diverifikasi dan tidak dapat diverifikasi.
5. Kekayaan informasi (*readability*) alat ukurnya berita berguna, kurang berguna, dan tidak berguna.
6. Kepadatan isi berita (*density*) alat ukurnya berita padat dan tidak padat.
7. Sudut pandang yang ditampilkan (*breadth*) alat ukurnya berita satu sudut pandang, dua sudut pandang, dan lebih dari dua sudut pandang.
8. Kedalaman isi berita (*depth*) alat ukurnya mendalam, kurang mendalam, dan tidak mendalam.
9. Verifikasi fakta alat ukurnya berita bisa diverifikasi dan tidak bisa diverifikasi.
10. Keberadaa saksi mata (*eye witness comparisons*) alat ukurnya berita tidak ada saksi, saksi diungkap jati dirinya, dan saksi tidak diungkap jati dirinya.
11. Kelengkapan unsur berita alat ukurnya berita lengkap mengandung 5W+1H dan berita tidak lengkap mengandung 5W+1H.
12. *Reference* alat ukurnya berita ada *reference* dan tidak ada *reference*.
13. *Relative salience* alat ukurnya berita relevan dan tidak relevan.
14. Penempatan berita (*relative priority*) alat ukurnya berita penting, kurang penting, dan tidak penting.
15. Bacalah sampel dengan teliti!
16. Pilihlah sesuai dengan konstruksi kategori dengan memilih salah satu alat ukurnya dengan memberikan tanda *checkbox* atau centang pada salah satu kolom di lembar koding.

A. Konstruksi Kategori Sifat Faktualitas Isi berita

• **Sub Kategori Faktualitas**

Ukuran sebuah paragraf dalam berita yang dikatakan mengandung fakta jika sesuai dengan kenyataan yang ada. Paragraf yang mengandung opini jika terdapat pernyataan seseorang yang mengandung unsur subyektivitas di dalamnya. Paragraf yang mengandung campuran keduanya jika terdapat fakta yang terjadi dengan adanya pernyataan seseorang. Dan untuk bukan keduanya atau netral jika dalam sebuah paragraf tidak terdapat unsur fakta dan opini.

• **Sub Kategori Kemampuan untuk Dicek Kembali (*Checkability*)**

Paragraf fakta dalam berita dikatakan dapat diverifikasi bila paragraf fakta tersebut menyebutkan sumber berita, atau metode memperoleh keterangan. Sebaliknya kategori tidak dapat diverifikasi dapat diukur bila dalam paragraf fakta, tidak disebutkan dengan jelas sumber beritanya.

• **Sub Kategori Tingkat Kekayaan Informasi (*Readability*)**

Sebuah berita dikatakan berguna jika informasi yang disampaikan tidak mengada-ada dan sesuai dengan kenyataan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan begitu sebaliknya.

B. Konstruksi Kategori Nilai Informasi (*Information Value*)

• **Sub Kategori Kepadatan Isi berita (*Density*)**

Sebuah berita yang padat berarti informasi yang diberikan lebih banyak memuat berita utama dibandingkan dengan pendamping. Sebaliknya, berita yang tidak padat tidak menjelaskan dengan jelas berita utama bahkan lebih banyak informasi pendamping didalamnya.

• **Sub Kategori Sudut Pandang yang Ditampilkan (*Breadht*)**

Sebuah berita yang memiliki satu sudut pandang jika hanya ada satu narasumber dalam berita tersebut. Dua sudut pandang, jika ada dua narasumber, dan lebih dari dua berarti lebih dari dua narasumber yang berbeda.

• **Sub Kategori Kedalaman Isi Berita (*Depth*)**

Sebuah berita dikatakan mendalam, jika memiliki penjelasan yang sangat detail untuk memverifikasi fakta atau menjelaskan suatu peristiwa. Berita dikatakan tidak mendalam, jika kurang memiliki penjelasan dan tidak terlalu fokus pada isu yang dibahas dalam berita tersebut. Sedangkan, berita dikatakan tidak mendalam, jika tidak memiliki penjelasan yang diberikan untuk memverifikasi fakta.

C. Konstruksi Kategori Akurasi

• **Sub Kategori Verifikasi Fakta**

Paragraf fakta dapat diverifikasi, jika fakta tersebut bisa diverifikasi atau dicek kebenarannya serta dibandingkan dengan liputan yang sama pada media lain. Sedangkan, kalimat fakta yang tidak dapat diverifikasi, jika fakta tersebut tidak bisa dicek kebenarannya.

• **Sub Kategori Keberadaan Keterangan Saksi Mata (*Eye witness comparisons*)**

Terdiri dari kategori tidak ada saksi, saksi diungkap jati dirinya, dan saksi tidak diungkap jati dirinya dalam sebuah teks berita. Apakah berita memuat keterangan saksi yang diungkapkan jati dirinya secara lengkap atau tidak lengkap bahkan tidak memiliki keterangan saksi.

D. Konstruksi Kategori Kelengkapan (*Completeness*)

- **Sub Kategori Kelengkapan Unsur Berita**

Suatu berita dikatakan lengkap unsur berita, jika memiliki kelengkapan unsur 5W+1H. Sedangkan, suatu berita dikatakan tidak lengkap jika tidak memiliki kelengkapan unsur berita yaitu 5W+1H. Hanya terdapat dua atau tiga unsur saja dikatakan tidak lengkap.

- **Sub Kategori *Reference (to any event record)***

Suatu berita dikatakan ada *reference*, jika berita tersebut memuat rujukan pada peristiwa sejenis di masa lampau atau terdapat catatan lain yang relevan. Dan sebaliknya suatu berita dikatakan tidak ada *reference*, jika berita tersebut tidak memuat rujukan pada peristiwa sejenis di masa lampau dan tidak terdapat catatan lain yang relevan.

E. Konstruksi Kategori Relevansi

- **Sub Kategori Relevansi Berita (*Relative salience*)**

Suatu berita dikatakan ada relevansi jika, berita tersebut relevan diangkat pada masa sekarang ini jika dibandingkan dengan isu lain. Sebaliknya, jika suatu berita tidak ada relevansi berarti berita tersebut tidak relevan diangkat pada masa sekarang, ada isu lain yang jauh lebih penting untuk diangkat.

- **Sub Kategori Penempatan Berita (*Relevance-Relative Priority*)**

Suatu berita dikatakan penting jika penempatannya berada di halaman awal dengan ilustrasi yang besar, judul dan sub judul yang besar. Sedangkan berita yang kurang penting biasanya berukuran tidak terlalu besar, dan berita yang tidak penting biasanya berada di bawah dengan judul dan sub judul yang kecil tanpa ilustrasi.

- **SURATKABAR PIKIRAN RAKYAT**

A. FAKTUALITAS

1) DIMENSI FAKTUALITAS, KATEGORI FAKTUALITAS

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : Wali Kota Bandung: Saya Tidak Menghilang

DADA DAN EDI JADI TERSANGKA (2 Juli 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Wali Kota Bandung Dada Rosada disangka sebagai otak kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, hakim yang menangani perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Tetapi Dada tak sendiri. Komisi Pemberantas Korupsi juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi sebagai tersangka.				
2.	Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Dada dan edi sebagai tersangka. "Penyidik menyimpulkan DR selaku wali kota Bandung diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Johan, Senin (1/7/2013).				
3.	Pasal yang sama juga disangkakan kepada Edi. Dada dan Edi disangka telah menyuap Setyabudhi untuk mengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bansos.				
4.	Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor menyebut, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.				
5.	"Penetapan tersangka ini sejak 1 Juli 2013," kata Johan. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengaku sudah meneken surat perintah penyelidikan pada Jum'at (28/6/2013) malam. Menurut Johan sebelum sprindik ditandatangani oleh semua pimpinan KPK. Setelah ketua dan empat wakil ketua KPK menandatangani, barulah sprindik diterbitkan pada 1 Juli 2013.				
6.	Sampai saat ini KPK masih menghitung berapa jumlah uang yang diserahkan untuk menyuap Setyabudhi. "Masih ditelusuri," ujar Johan. KPK tidak hanya melihat suap yang diserahkan itu sebatas uang yang diterima Setyabudhi dari Asep Triana pada saat tangkap tangan, yaitu sebesar Rp 150 juta dan Rp 350 juta yang ditemukan di mobil Asep.				
7.	Pengacara Dada, Abidin, mengatakan, pihaknya akan mengikuti				

	proses hukum yang berjalan di KPK, “Kita ikuti saja,” ujar Abidin kepada “PR”.				
8.	Saat ditanya kesiapan Dada membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyuaipan ini, Abidin mengatakan, kliennya tidak tahu-menahu soal penyuaipan ini. “Pak Dada kan tidak tahu, siapa yang menerima (suap) kan tidak tahu, faktanya Pak Herry (herry Nurhayat) menitipkan uang ke Toto Hutagalung kemudian diberikan ke Asep,” katanya.				
9.	Ditambah Dada dan Edi, jumlah tersangka dalam kasus suap bansos menjadi enam orang. Empat lainnya, Setyabudhi Tedjocahyono, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung dan anak buahnya Asep Triana.				
10.	KPK sudah memanggil Dada sembilan kali dan Edi sedikitnya enam kali sebelum keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, keduanya saling tuding. Menurut Dada, soal patungan itu jadi urusan Edi yang kala itu menjabat sebagai sekretaris daerah. Menurut Dada, Edi tak selalu melaporkan kegiatannya kepada Dada. Sementara menurut Edi, ada perintah dari Dada untuk mengoordinasikan pengumpulan uang.				
11.	Toto pernah mengaku pemberian uang pertama kalinya untuk memenuhi permintaan Setyabudhi diserahkan oleh Edi. Menurut Toto, ia hanya menyampaikan permintaan uang oleh Setyabudhi kepada Pemkot Bandung.				
12.	Menurut Johan, KPK tak akan berhenti samapai pada penetapan dua tersangka baru ini. KPK masih terus mengembangkan pemeriksaan kasus ini untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain, terutama dari sisi penerima suap. Masih dalam rangka pengembangan kasus ini, KPK kembali memeriksa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono, “Yang bersangkutan hadir,” ujar Johan.				
13.	Usai pengumuman KPK, Edi Siswandi tidak dapat ditemui saat “PR” menyambangi rumahnya di Jalan Cijawura Girang, rumahnya tampak sepi. Empat orang terlihat berada di saung di halaman rumah, sementara dua mobil terparkir.				
14.	“Bapak sedang istirahat, tadi bilang ke saya mau tidur,” kata Cahyo, seorang yang mengaku pegawai Edi Siswandi. Menurut pemilik kios di depan rumah Edi, sejak pagi Edi tak terlihat keluar dari rumahnya.				
15.	Lain Edi, lain Dada Rosada yang menggelar konferensi pers di rumah dinas di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Senin. Konferensi pers digelar dengan tujuan untuk meluruskan pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan Dada menghilang begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.				
16.	“Saya tidak menghilang, hari Sabtu dan Minggu saya ada di rumah, saya juga jalan-jalan keliling kota, kemudian makan di luar rumah, karena tidak sedang ada janji dengan siapa pun, saya rasa sama seperti wartawan juga, saya kan bebas pergi kemana saja. Jadi tidak benar kalau dikatakan saya kabur atau ada niat untuk sembunyi,” tutur Dada yang didampingi oleh Kadiskominfo Kota Bandung Bulgan Alamin.				
17.	“Kalau sedang tidak ada dinas atau janji dengan siapa pun, kan bisa saja keluar dengan keluarga atau pergi sendiri, beda halnya				

	kalau saya pergi sudah ada janji.” ujar Dada. Sejak Sabtu (29/7/2013) pekan lalu hingga kemarin, wartawan memang tidak menerima jadwal atau agenda kedinasan rutin orang nomor satu di Kota Bandung itu dari staf Diskominfo maupun protokoler. Adapun agenda kedinasan hanya diisi oleh Wakil wali Kota Bandung Ayi Vivananda maupun Pelaksana Tugas Sekda Kota Bandung Yossi Irianto.				
18.	Mengenai proses hukum selanjutnya, Dada menegaskan kalau dia akan kooperatif. “Proses hukum ya harus diikuti, bahwa nantinya ini terbukti salah siapa, biarkan proses hukum yang berjalan, kita harus hormati, jadi jangan sampai dihambat,” kata Dada.				
19.	Dia juga mengatakan tidak akan mangkir dari panggilan KPK tanpa alasan jelas. “Waktu saya dapat surat panggilan dengan format yang tidak sesuai dengan format KPK saja saya hadir, apalagi kalau format yang betul,” ucapnya.				
20.	Dada mengaku hingga saat ini belum menerima surat resmi perihal penetapannya sebagai tersangka. “Saya kan dari koran tahunya, dari media, jadi ya mengenai bagaimana harus menanggapi saya kira sama dengan orang lain, karena pasti punya perasaan yang sama,” tutur Dada.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : DADA ROSADA BERAKHIR DI CIPINANG (20 Agustus 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Wali Kota Bandung Dada Rosada terancam tak bisa menghadiri pelantikan wali kota Bandung yang baru yang rencananya digelar 16 September mendatang. Soalnya, Dada keburu tersandung kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk pertama kalinya memeriksa Dada sebagai tersangka kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, Senin (19/8/2013), tak membiarkan Dada pulang.				
2.	Setelah diperiksa sekitar enam jam, Dada dijebloskan ke Rumah Tahanan Cipinang di Jakarta. Baju putih bergaris yang dikenakan Dada saat datang ke KPK, sudah tertutup rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Meski begitu, Dada masih menebar senyum kepada puluhan wartawan yang menunggunya.				
3.	“Nanti saja pada saatnya,” kata Dada sesaat sebelum memasuki mobil tahanan KPK, Senin (19/8/2013). Didampingi seorang penyidik dan pengawal tahanan, mobil membawa Dada ke Rutan Cipinang.				
4.	Kuasa hukum Dada, Abidin mengatakan, kliennya sudah siap mental kalau pemeriksaannya harus berakhir dengan penahanan. “Saya sudah ceritakan di KPK sudah ada proses, tersangka ada penahanan 20 hari sampai habis 120 hari, beliau sudah paham, sudah menyerahkan sepenuhnya,” ujar Abidin.				
5.	Ia mengatakan, kliennya siap membuat kasus itu terang-benerang.				

	Termasuk mengungkapkan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. “Siap kooperatif seperti itu. Tiga hal yang saya tekankan, agar keterangan itu harus yang dilihat sendiri, dialami sendiri, dan didengar sendiri. Pak Dada akan menyampaikan apa adanya, tidak bermaksud menyalahkan orang lain,” tuturnya.				
6.	Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Dada ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan. Dada diduga telah menyuap Setyabudhi untuk memengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Dada terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.				
7.	Kemarin, Abidin menegaskan Dada tidak pernah memberi uang kepada siapa pun. Dada juga tidak menyetujui pemberian uang terhadap hakim. Namun Dada mengaku ada permintaan uang sebesar 3 miliar untuk hakim. Permintaan itu datang dari ToTo Hutagalung yang disampaikan kepada salah seorang kepala dinas. “Awalnya Toto minta ke satu kadis (kepala dinas), dijawab harus izin dulu ke Pak Dada. Awalnya minta Rp 3 miliar, Pak Dada tanya, ‘siapa itu yang minta?’ (Dijawab) Tanya saja ke X, saya sebut X saja ya,” tutur Abidin.				
8.	X yang disebut Abidin adalah hakim yang menurut Toto meminta uang kepadanya, “Itu permintaan dari hakim katanya (Toto),” kata Abidin.				
9.	Setelah itu, kata Abidin, Dada tidak pernah lagi berkomunikasi menagai rencana pemberian uang. Abidin membantah bahwa Dada memerintahkan anak buahnya urunan, “Pak Toto sudah koordinasi dengan di bawah,” ujarnya.				
10.	Abidin mengatakan, pemberian uang Rp 125 juta kepada Setyabudhi ketika tangkap tangan pada Maret lalu bukanlah pemberian pertama. Setyabudhi sudah berkali-kali menerima uang dari Toto. Namun ia tidak menjelaskan berapa uang yang sudah diserahkan kepada Setyabudhi.				
11.	Dada seharusnya diperiksa Jumat (16/8/2013), hari yang sama dengan pemeriksaan terhadap manatan Sekertaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi yang berbuntut penahana Edi di Rutan Salemba. Dada lolos dari penahanan karena ia memilih menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung ketimbang memenuhi panggilan KPK.				
12.	Ketidakhadiran Dada pada Jumat itu ditanyakan kepada saksi yang diperiksa kemarin.				
13.	Sekda Kota Bandung Yosi Irianto kemarin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dada dan Edi. Selain menanyakan tentang keberadaan Dada pada Jumat, penyidik juga menyinggung soal pelantikan Yosi yang dilakukan malam hari. Menurut Yosi, pelantikan dilakukan setelah ada surat dari Pemprov Jawa Barat agar wali kota Bandung segera melantik sekda kota Bandung.				
14.	“Saya jelaskan, memang benar Pak Dada sedang rapat di DPRD. Saya juga ada di sana, peantikan itu tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang berjalan di KPK,” kata Yosi.				
15.	Pemeriksaan terhadap Yosi hanya berlangsung kurang dari dua jam. Materi pemeriksaannya hampir sama dengan materi untuk				

	keempat tersangka sebelumnya.				
16.	Selain Yosi, penyidik juga memeriksa tiga kepala dinas di Pemkot Bandung. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiandi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana, ketiganya sudah pernah diperiksa sebelumnya.				
17.	Begitu Dada resmi ditahan KPK, di rumahnya di Jalan Tirtasari II NO 12, Kota Bandung tak tampak kegiatan apa pun. Sejumlah mobil diparkir di depan rumah serta di garasi. Di dalam garasi ada tiga mobil, diantaranya Toyota Innova D 1701, dua mobil lainnya tertuup terpal. Menjelang pukul 21.00, satu per satu mobil yang terparkir di luar rumah, mulai meninggalkan tempatnya.				
18.	Tamu-tamu yang keluar dari rumah Dada Rosada enggan berkomentar. Seorang tamu yang keluar dari rumah Dada, hanya menjawab singkat ketika ditanya wartawan, "Enggak, enggak, enggak tahu," katanya singkat sambil masuk ke mobilnya.				
19.	Beberapa anggota Satpol PP dan protokoler tampak berjaga di pos jaga serta samping rumah Dada. Mereka juga kompak tutup mulut, "Tidak tahu, saya juga baru datang maghrib," kata seorang petugas saat ditanya keberadaan keluarga Dada.				
20.	Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda prihatin mendengar kabar penahanan Dada. "Prihatin, berharap KPK bisa menangguhkan penahanan sementara waktu dengan pertimbangan hukum bahwa Pak Dada selama ini bersikap kooperatif dalam pemeriksaan," ucap Ayi.				
21.	"Dengan alasan kemanusiaan, yang bersangkutan telah mengabdikan untuk Kota Bandung," ujarnya.				
22.	Lagipula, disambung Ayi, hanya tinggal sebulan lagi akan dilakukan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota terpilih. "Tapi kami hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, meskipun kami akan berpegang pada asa praduga tak bersalah," kata Ayi.				
23.	Dia menambahkan, Pemkot akan memberikan bantuan hukum yang memadai untuk pendampingan kasus ini.				
24.	Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu menilai, penahanan Dada akan memiliki pengaruh emosional terhadap suasana kerja di lingkungan Pemkot Bandung. "Secara mekanisme, Pak Wali sudah menyerahkan laporan akhir masa jabatan, sudah menyerahkan pertanggungjawaban APBD, dan kemarin juga sudah menghadiri rapat paripurna usulan pemberhentian dan pelantikan wali kota baru," tutur Haru.				
25.	Meskipun demikian, kata dia, wewenang Dada sebagai wali kota masih <i>full</i> hingga 16 September mendatang. "Suasana keprihatinan pasti ada, jadi secara emosional pasti ada pengaruh," ujarnya.				
26.	Akan tetapi, dia berharap agar kualitas pelayanan dan suasana pemerintahan di Pemkot Bandung tak terpengaruh. Apalagi secara aturan masih ada wakil wali kota Bandung dan sekda.				
27.	Sementara itu, penahanan Dada diperkirakan tidak akan mengganggu jadwal pelantikan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018 yang rencananya akan dilangsungkan pada 16 September 2013 mendatang. Pelantikan akan tetap berlangsung di				

	Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Bandung.				
28.	“Kami sangat prihatin mendengar kabar ini (penahanan Dada), mudah-mudahan saat pelantikan nanti tetap bisa hadir,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu, ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin sore.				
29.	Haru mengatakan, berdasar mekanisme hukum yang berlaku, kehadiran wali kota yang akan berakhir masa jabatannya tidak akan memengaruhi sah-tidaknya pelantikan. “Tapi kami harapkan nanti Pak wali bisa hadir, saya pikir semua juga merasa prihatin dengan kejadian ini,” katanya.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

**Isu Pemberitaan : Edi Sukanto dari Istana Group Ikut Diperiksa
KPK PERTIMBANGKAN IZIN DADA (21 Agustus 2013)**

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Komisi Pemberantas Korupsi masih menimbang pentingnya Wali Kota Bandung Dada Rosada hadir dalam pelantikan dan serah terima jabatan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018, 16 September mendatang. Kalau ketidakhadiran Dada tidak mengurangi sahnya acara, KPK tidak akan mengabulkan permintaan DPRD Kota Bandung untuk menghadirkan Dada yang saat ini ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.				
2.	“Akan dipelajari dulu sejauh mana pentingnya kehadiran DR dalam pelantikan itu, apakah wajib hukumnya atau tidak?” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Sabtu (20/8/2013).				
3.	Johan mengatakan, sampai saat ini KPK belum menerima surat permintaan dari DPRD Kota Bandung yang meminta Dada diizinkan hadir dalam acara itu (Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan surat sudah dikirim ke KPK pada Senin 19/8/2013, malam).				
4.	Johan menjelaskan, KPK juga belum pernah mengabulkan permintaan untuk mengeluarkan seorang tahanan untuk menghadiri acara serah terima jabatan. “Belum ada yang seperti ini. Ada beberapa contoh, misalnya orangtuanya meninggal atau anggota keluarganya meninggal,” kata Johan.				
5.	Kendati kasusnya berbeda, ada beberapa kepala daerah yang dilantik dan melantik pejabat saat terjerat kasus korupsi. Pada 2011, terdakwa kasus korupsi Yusak Yulowo dilantik oleh Gubernur Papua Bernabas Suebu sebagai bupati Boven Digul. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Papua untuk melantik Yusak dilakukan di Gedung Kementrian Dalam negeri, Jakarta. Hal itu karena Yusak sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang. Pelantikan itu mendapat pengawasan ketat dari Rutan Cipinang dan aparat penegak hukum lainnya.				
6.	Kasus lainnya, Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar yang				

	berstatus sebagai tahanan melantik kepala dinas di Rutan Cipinang. Itu bisa terjadi lantaran Menteri Dalam negeri belum memberhentikan Jefferson.				
7.	Selasa (20/8/2013) kemarin, penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap Setyabudhi Tedjocahjono untuk tersangka Dada Rosada dan Edi Siswandi. Saksi-saksi yang diperiksa ialah Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Gunandhi Sukma Bhinekas, Asisten II Pemkot Bandung Ubad Bachtiar, dan Kepala Bagian Hukum pemkot Bandung Erik M Attauric, ketiganya sudah diperiksa untuk empat tersangka lain.				
8.	Salah satu materi yang ditanyakan adalah urunan kepala dinas yang diduga sebagai sumber uang suap untuk Setyabudhi. "Tadi Cuma ditanya sejak kapan kenal Pak Dada. Bagaimana hubungan dengan beliau. Tidak ada soal patungan," kata Gunandhi.				
9.	Selain tiga pejabat itu, KPK juga memeriksa Edi Sukamto. "Sebagai manajemen Istana Group," ujar Johan.				
10.	Menurut situs web Istana Group, Edi Sukamto adalah salah seorang pendiri kelompok usaha di bidang properti terkemuka di Bandung. Beberapa usaha yang dikelolanya adalah Pasar Baru Trade Center, BEC, IBCC, Pusat Belanja Balubur, ITC Kosambi, dan masih banyak lagi. Johan tidak menjelaskan secara terperinci, mengapa Edi Sukamto menjadi saksi dalam penyidikan kasus ini.				
11.	Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, uang yang digunakan untuk menyuap Setyabudhi berasal dari 3 sumber. Yaitu patungan pejabat di Pemkot Bandung, pinjaman dari pihak ketiga, dan dari uang bansos yang berhasil dicairkan.				
12.	Sementara itu, suasana kerja dan pelayanan di Pemkot Bandung, Selasa, terpantau tetap normal. Meskipun terlontar keprihatinan dari beberapa staf dan pegawai negeri di lingkungan Pemkot Bandung, situasi tetap terlihat seperti biasa.				
13.	Meskipun demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung Bulgan Alamin mengakui adanya perbedaan suasana psikologis. "Suasana psikologis PNS ya prihatin, tapi pelayanan tetap seperti biasa," kata Bulgan.				
14.	Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan, layanan publik di Pemkot Bandung tidak akan terganggu menyusul dilakukannya penahanan terhadap Dada. "Karena masih ada wakilnya, Pak Ayi jadi masih berjalan dengan baik, karena yang penting layanan publik tidak terganggu. Pak Ayi akan jalan," kata Heryawan.				
15.	Heryawan pun menegaskan, tidak perlu ada pergantian sementara. Apalagi dalam waktu dekat wali kota dan wakil wali kota Bandung terpilih akan segera dilantik. "Yang pasti, ikuti saja proses hukum yang ada, karena ini sudah masuk keranah hukum, ikuti saja. Mengenai pergantian saya kira tidak perlu, kan ada wakil wali kota sebentar lagi juga akan dilantik," tuturnya.				
16.	Penahanan Dada juga dipastikan tidak akan memengaruhi rencana pelantikan wali kota Bandung yang baru. "Tidak mungkin mundur (jadwal pelantikannya) karena tanggal 16 merupakan batas akhir jabatan periode kepemimpinan Pak Dada dan pak Ayi," kata Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan.				
17.	Erwan mengatakan, telah mengirimkan surat kepada KPK Senin				

	malam. "Suaratnya berisi permohonan agar Pak Dada bisa hadir dalam pelantikan, sepertinya tidak lengkap kalau tidak ada kehadiran beliau (Dada Rosada)," ucapnya.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : PENAHANAN DADA DIPERPANJANG (7 September 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Komisi Pemberantas Korupsi memperpanjang penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang belum rampung. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penahanan Dada diperpanjang 40 hari.				
2.	"Kemarin baru ditahan untuk 20 hari, sekarang diperpanjang," kata Johan Budi, Jumat (6/9/2013).				
3.	Dada ditahan pada 19 Agustus lalu setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahanannya akan habis pada akhir pekan ini. Untuk keperluan perpanjangan masa tahanan itu, Dada dipanggil ke KPK. Sekitar satu jam Dada bertemu dengan penyidik. "Perpanjangan (penahanan)," kata Dada usai menjalani pemeriksaan.				
4.	Ditanya wartawan dengan berbagai pertanyaan, Dada tak banyak komentar. Dada hanya menanggapi pertanyaan wartawan soal kesannya mendekam di Rutan Cipinang. "Enak tidak enak ya," ujarnya sesaat sebelum memasuki mobil tahanan.				
5.	Sementara itu, KPK memastikan foto penggalan surat perintah penyidikan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Bupati Bogor, Rachmat Yasin palsu. KPK tidak pernah menerbitkan sprindik untuk kedua pejabat itu. Pengawas Internal KPK tengah menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya surat palsu itu. Lembaga antirasuah itu tengah mempertimbangkan untuk melaporkan pelakunya ke polisi.				
6.	"Hari ini (Jumat, 6/9/2013) ada rapat membahas soal itu (foto penggalan sprindik), saya diperintahkan menjelaskan kepada media tadi disampaikan potongan salinan sprindik Jro Wacik adalah palsu," kata Johan Budi. Demikian pula dengan sprindik yang ditunjukkan untuk Rachmat Yasin.				
7.	KPK dengan yakin menyebut surat itu palsu lantaran samapai saat ini KPK belum pernah menerbitkan sprindik atas nama kedua orang itu. "KPK belum mengeluarkan sprindik baru kasus SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum) di Kabupaten Bogor," kata Johan.				
8.	Beredarnya surat palsu itu bermula ketika beberapa redaksi media massa dan wartawan menerima surat elektronik dari satgasmafiahukum@gmail.com . Surat elektronik itu berisi empat lampiran berisi foto dokumen yang mirip dengan redaksional				

	sprindik yang diterbitkan KPK. Dua foto merupakan sprindik untuk Jero Wacik, dua foto lainnya berkaitan dengan Rachmat Yasin.				
9.	Di lampiran itu tertulis, KPK melakukan penyidikan terhadap Jero Wacik karena melakukan tindak pidana korupsi menerima suap atau janji berkaitan dengan proyek PT Kernel Oil Pte Ltd. Jero disangka dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Surat itu tampak meyakinkan dengan tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dilengkapi dengan stempel KPK. Tertulis Agustus 2013 dengan membiarkan tanggalnya kosong. Di sebelah kiri bawah, terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam, “Tunggu Persetujuan Presiden (RI)”.				
10.	Surat untuk Rachmat kurang lebih sama, bedanya surat untuk Rachmat tak disertai tulisan tangan seperti surat untuk Jero. Dalam surat itu, Rachmat disangka dengan pasal sama, penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan izin lokasi pembangunan TPBU di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal surat itu 22 Mei 2013 dituis tangan.				
11.	Saat dikonfirmasi tentang hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membantah telah menandatangani sprindik itu. “Hati-hati! Setau saya belum ada tersangka lain (dalam kasus SKK Migas) selain tiga orang yang telah ditetapkan KPK,” kata Bambang Widjojanto dalam pesan singkatnya.				
12.	Menurut Johan, terdapat beberapa kejanggalan pada surat itu. Antara lain, foto yang beredar tidak menunjukkan surat itu secara utuh, sehingga yang terlihat hanya penggalannya saja. Selain itu, ada huruf yang berbeda, “Huruf ‘di Jakarta’ dan ‘Agustus’ itu berbeda,” ujarnya.				
13.	Johan mengatakan, beredarnya surel itu merupakan upaya kesengajaan untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini, kata Johan, Pengawas Internal KPK telah bergerak mencari orang yang bertanggung jawab. “Pengawas Internal turun mencari tahu siapa yang mengganggu itu,” katanya.				
14.	Johan menegaskan, KPK tidak akan membentuk Komite Etik untuk menyelesaikan persoalan surat palsu itu, sebab KPK memang tidak pernah menerbitkan sprindik itu. Hal itu berbeda dengan bocornya sprindik Anas Urbaningrum. “Kalau sprindik Anas yang bocor itu, KPK memang mengakui itu surat kami yang dibocorkan oleh pihak dalam. Sementara ini, kami belum pernah mengeluarkan sprindik atas nama Jero Wacik,” tuturnya.				
15.	Johan justru menyamakan kasus ini dengan surat panggilan saksi palsu yang pernah dikirimkan kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada pada 4 April lalu mendatangi KPK karena menerima surat panggilan sebagai saksi kasus suap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudhi Tedjocahjono yang menangani perkara dana bantuan sosial Kota Bandung. “Waktu itu pengawas Internal KPK juga menyelidiki,” ujarnya.				
16.	Sampai berita ini ditulis, pimpin KPK masih membahas langkah apa yang akan diambil selanjutnya. “Apakah perlu melapor ke polisi,” kata Johan.				
17.	Johan mengatakan sampai saat ini KPK belum berencana memanggil Jero dalam kasus suap Kepala SKK Migas Rubi				

	Rubiandini. “Kalau Sekjen Kementerian ESDM memang ada rencana, tapi belum tahu tanggal berapa,” ujarnya.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

2) DIMENSI FAKTUALITAS, KATEGORI CHECKABILITY

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : Wali Kota Bandung: Saya Tidak Menghilang

DADA DAN EDI JADI TERSANGKA (2 Juli 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Wali Kota Bandung Dada Rosada disangka sebagai otak kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, hakim yang menangani perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Tetapi Dada tak sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi sebagai tersangka.		
2.	Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Dada dan edi sebagai tersangka. “Penyidik menyimpulkan DR selaku wali kota Bandung diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Johan, Senin (1/7/2013).		
3.	Pasal yang sama juga disangkakan kepada Edi. Dada dan Edi disangka telah menyuap Setyabudhi untuk mengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bansos.		
4.	Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor menyebut, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.		
5.	“Penetapan tersangka ini sejak 1 Juli 2013,” kata Johan. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengaku sudah menekan surat perintah penyelidikan pada Jum’at (28/6/2013) malam. Menurut Johan sebelum sprindik ditandatangani oleh semua pimpinan KPK. Setelah ketua dan empat wakil ketua KPK menandatangani, barulah sprindik diterbitkan pada 1 Juli 2013.		
6.	Sampai saat ini KPK masih menghitung berapa jumlah uang yang diserahkan untuk menyuap Setyabudhi. “Masih ditelusuri,” ujar Johan. KPK tidak hanya melihat suap yang diserahkan itu sebatas uang yang diterima Setyabudhi dari Asep Triana pada saat tangkap tangan, yaitu sebesar Rp 150 juta dan Rp 350 juta yang ditemukan di mobil Asep.		
7.	Pengacara Dada, Abidin, mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK, “Kita ikuti saja,” ujar Abidin kepada “PR”.		
8.	Saat ditanya kesiapan Dada membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyuapan ini, Abidin mengatakan, kliennya tidak tahu-menahu soal penyuapan ini. “Pak Dada kan tidak tahu, siapa yang menerima (suap) kan tidak tahu, faktanya Pak Herry (herry Nurhayat) menitipkan uang ke Toto Hutagalung kemudian diberikan ke Asep,” katanya.		
9.	Ditambah Dada dan Edi, jumlah tersangka dalam kasus suap bansos menjadi enam orang. Empat lainnya, Setyabudhi Tedjocahyono, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung dan anak buahnya Asep Triana.		
10.	KPK sudah memanggil Dada sembilan kali dan Edi sedikitnya enam kali sebelum keduanya		

	ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, keduanya saling tuding. Menurut Dada, soal patungan itu jadi urusan Edi yang kala itu menjabat sebagai sekretaris daerah. Menurut Dada, Edi tak selalu melaporkan kegiatannya kepada Dada. Sementara menurut Edi, ada perintah dari Dada untuk mengoordinasikan pengumpulan uang.		
11.	Toto pernah mengaku pemberian uang pertama kalinya untuk memenuhi permintaan Setyabudhi diserahkan oleh Edi. Menurut Toto, ia hanya menyampaikan permintaan uang oleh Setyabudhi kepada Pemkot Bandung.		
12.	Menurut Johan, KPK tak akan berhenti samapai pada penetapan dua tersangka baru ini. KPK masih terus mengembangkan pemeriksaan kasus ini untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain, terutama dari sisi penerima suap. Masih dalam rangka pengembangan kasus ini, KPK kembali memeriksa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono, “Yang bersangkutan hadir,” ujar Johan.		
13.	Usai pengumuman KPK, Edi Siswandi tidak dapat ditemui saat “PR” menyambangi rumahnya di Jalan Cijawura Girang, rumahnya tampak sepi. Empat orang terlihat berada di saung di halaman rumah, sementara dua mobil terparkir.		
14.	“Bapak sedang istirahat, tadi bilang ke saya mau tidur,” kata Cahyo, seorang yang mengaku pegawai Edi Siswandi. Menurut pemilik kios di depan rumah Edi, sejak pagi Edi tak terlihat keluar dari rumahnya.		
15.	Lain Edi, lain Dada Rosada yang menggelar konferensi pers di rumah dinas di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Senin. Konferensi pers digelar dengan tujuan untuk meluruskan pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan Dada menghilang begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.		
16.	“Saya tidak menghilang, hari Sabtu dan Minggu saya ada di rumah, saya juga jalan-jalan keliling kota, kemudian makan di luar rumah, karena tidak sedang ada janji dengan siapa pun, saya rasa sama seperti wartawan juga, saya kan bebas pergi kemana saja. Jadi tidak benar kalau dikatakan saya kabur atau ada niat untuk sembunyi,” tutur Dada yang didampingi oleh Kadiskominfo Kota Bandung Bulgan Alamin.		
17.	“Kalau sedang tidak ada dinas atau janji dengan siapa pun, kan bisa saja keluar dengan keluarga atau pergi sendiri, beda halnya kalau saya pergi sudah ada janji.” ujar Dada. Sejak Sabtu (29/7/2013) pekan lalu hingga kemarin, wartawan memang tidak menerima jadwal atau agenda kedinasan rutin orang nomor satu di Kota Bandung itu dari staf Diskominfo maupun protokol. Adapun agenda kedinasan hanya diisi oleh Wakil wali Kota Bandung Ayi Vivananda maupun Pelaksana Tugas Sekda Kota Bandung Yossi Irianto.		
18.	Mengenai proses hukum selanjutnya, Dada menegaskan kalau dia akan kooperatif. “Proses hukum ya harus diikuti, bahwa nantinya ini terbukti salah siapa, biarkan proses hukum yang berjalan, kita harus hargai, jadi jangan sampai dihambat,” kata Dada.		
19.	Dia juga mengatakan tidak akan mangkir dari panggilan KPK tanpa alasan jelas. “Waktu saya dapat surat panggilan dengan format yang tidak sesuai dengan format KPK saja saya hadir, apalagi kalau format yang betul,” ucapnya.		
20.	Dada mengaku hingga saat ini belum menerima surat resmi perihal penetapannya sebagai tersangka. “Saya kan dari koran tahunya, dari media, jadi ya mengenai bagaimana harus menanggapinya saya kira sama dengan orang lain, karena pasti punya perasaan yang sama,” tutur Dada.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : DADA ROSADA BERAKHIR DI CIPINANG (20 Agustus 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Wali Kota Bandung Dada Rosada terancam tak bisa menghadiri pelantikan wali kota Bandung yang baru yang rencananya digelar 16 September mendatang. Soalnya, Dada keburu tersandung kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk pertama kalinya memeriksa Dada sebagai tersangka kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, Senin (19/8/2013), tak membiarkan Dada pulang.		
2.	Setelah diperiksa sekitar enam jam, Dada dijebloskan ke Rumah Tahanan Cipinang di Jakarta. Baju putih bergaris yang dikenakan Dada saat datang ke KPK, sudah tertutup rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Meski begitu, Dada masih menebar senyum kepada puluhan wartawan yang menunggunya.		
3.	“Nanti saja pada saatnya,” kata Dada sesaat sebelum memasuki mobil tahanan KPK, Senin (19/8/2013). Didampingi seorang penyidik dan pengawal tahanan, mobil membawa Dada ke Rutan Cipinang.		
4.	Kuasa hukum Dada, Abidin mengatakan, kliennya sudah siap mental kalau pemeriksaannya harus berakhir dengan penahanan. “Saya sudah ceritakan di KPK sudah ada proses, tersangka ada penahanan 20 hari sampai habis 120 hari, beliau sudah paham, sudah menyerahkan sepenuhnya,” ujar Abidin.		
5.	Ia mengatakan, kliennya siap membuat kasus itu terang-benerang. Termasuk mengungkapkan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. “Siap kooperatif seperti itu. Tiga hal yang saya tekankan, agar keterangan itu harus yang dilihat sendiri, dialami sendiri, dan didengar sendiri. Pak Dada akan menyampaikan apa adanya, tidak bermaksud menyalahkan orang lain,” tuturnya.		
6.	Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Dada ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan. Dada diduga telah menyuap Setyabudhi untuk memengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Dada terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.		
7.	Kemarin, Abidin menegaskan Dada tidak pernah memberi uang kepada siapa pun. Dada juga tidak menyetujui pemberian uang terhadap hakim. Namun Dada mengaku ada permintaan uang sebesar 3 miliar untuk hakim. Permintaan itu datang dari ToTo Hutagalung yang disampaikan kepada salah seorang kepala dinas. “Awalnya Toto minta ke satu kadis (kepala dinas), dijawab harus izin dulu ke Pak Dada. Awalnya minta Rp 3 miliar, Pak Dada tanya, ‘siapa itu yang minta?’ (Dijawab) Tanya saja ke X, saya sebut X saja ya,” tutur Abidin.		
8.	X yang disebut Abidin adalah hakim yang menurut Toto meminta uang kepadanya, “Itu permintaan dari hakim katanya (Toto),” kata Abidin.		
9.	Setelah itu, kata Abidin, Dada tidak pernah lagi berkomunikasi menagai rencana pemberian uang. Abidin membantah bahwa Dada memerintahkan anak buahnya urunan, “Pak Toto sudah koordinasi dengan di bawah,” ujarnya.		
10.	Abidin mengatakan, pemberian uang Rp 125 juta kepada Setyabudhi ketika tangkap tangan pada Maret lalu bukanlah pemberian pertama. Setyabudhi sudah berkali-kali menerima uang dari Toto. Namun ia tidak menjelaskan berapa uang yang sudah diserahkan kepada Setyabudhi.		
11.	Dada seharusnya diperiksa Jumat (16/8/2013), hari yang sama dengan pemeriksaan terhadap manatan Sekertaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi yang berbuntut penahana Edi di Rutan Salemba. Dada lolos dari penahanan karena ia memilih menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung ketimbang memenuhi panggilan KPK.		
12.	Ketidakhadiran Dada pada Jumat itu ditanyakan kepada saksi yang diperiksa kemarin.		

13.	Sekda Kota Bandung Yosi Irianto kemarin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dada dan Edi. Selain menanyakan tentang keberadaan Dada pada Jumat, penyidik juga menyinggung soal pelantikan Yosi yang dilakukan malam hari. Menurut Yosi, pelantikan dilakukan setelah ada surat dari Pemprov Jawa Barat agar wali kota Bandung segera melantik sekda kota Bandung.		
14.	“Saya jelaskan, memang benar Pak Dada sedang rapat di DPRD. Saya juga ada di sana, peantikan itu tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang berjalan di KPK,” kata Yosi.		
15.	Pemeriksaan terhadap Yosi hanya berlangsung kurang dari dua jam. Materi pemeriksaannya hampir sama dengan materi untuk keempat tersangka sebelumnya.		
16.	Selain Yosi, penyidik juga memeriksa tiga kepala dinas di Pemkot Bandung. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiandi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana, ketiganya sudah pernah diperiksa sebelumnya.		
17.	Begitu Dada resmi ditahan KPK, di rumahnya di Jalan Tirtasari II NO 12, Kota Bandung tak tampak kegiatan apa pun. Sejumlah mobil diparkir di depan rumah serta di garasi. Di dalam garasi ada tiga mobil, diantaranya Toyota Innova D 1701, dua mobil lainnya tertutup terpal. Menjelang pukul 21.00, satu per satu mobil yang terparkir di luar rumah, mulai meninggalkan tempatnya.		
18.	Tamu-tamu yang keluar dari rumah Dada Rosada enggan berkomentar. Seorang tamu yang keluar dari rumah Dada, hanya menjawab singkat ketika ditanya wartawan, “Enggak, enggak, enggak tahu,” katanya singkat sambil masuk ke mobilnya.		
19.	Beberapa anggota Satpol PP dan protokoler tampak berjaga di pos jaga serta samping rumah Dada. Mereka juga kompak tutup mulut, “Tidak tahu, saya juga baru datang maghrib,” kata seorang petugas saat ditanya keberadaan keluarga Dada.		
20.	Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda prihatin mendengar kabar penahanan Dada. “Prihatin, berharap KPK bisa menanggulangi penahanan sementara waktu dengan pertimbangan hukum bahwa Pak Dada selama ini bersikap kooperatif dalam pemeriksaan,” ucap Ayi.		
21.	“Dengan alasan kemanusiaan, yang bersangkutan telah mengabdikan untuk Kota Bandung,” ujarnya.		
22.	Lagipula, disambung Ayi, hanya tinggal sebulan lagi akan dilakukan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota terpilih. “Tapi kami hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, meskipun kami akan berpegang pada asa praduga tak bersalah,” kata Ayi.		
23.	Dia menambahkan, Pemkot akan memberikan bantuan hukum yang memadai untuk pendampingan kasus ini.		
24.	Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu menilai, penahanan Dada akan memiliki pengaruh emosional terhadap suasana kerja di lingkungan Pemkot Bandung. “Secara mekanisme, Pak Wali sudah menyerahkan laporan akhir masa jabatan, sudah menyerahkan pertanggungjawaban APBD, dan kemarin juga sudah menghadiri rapat paripurna usulan pemberhentian dan pelantikan wali kota baru,” tutur Haru.		
25.	Meskipun demikian, kata dia, wewenang Dada sebagai wali kota masih <i>full</i> hingga 16 September mendatang. “Suasana keprihatinan pasti ada, jadi secara emosional pasti ada pengaruh,” ujarnya.		
26.	Akan tetapi, dia berharap agar kualitas pelayanan dan suasana pemerintahan di Pemkot Bandung tak terpengaruh. Apalagi secara aturan masih ada wakil wali kota Bandung dan sekda.		
27.	Sementara itu, penahanan Dada diperkirakan tidak akan mengganggu jadwal pelantikan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018 yang rencananya akan dilangsungkan pada 16 September 2013 mendatang. Pelantikan akan tetap berlangsung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Bandung.		
28.	“Kami sangat prihatin mendengar kabar ini (penahanan Dada), mudah-mudahan saat pelantikan nanti tetap bisa hadir,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu, ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin sore.		

29.	Haru mengatakan, berdasar mekanisme hukum yang berlaku, kehadiran wali kota yang akan berakhir masa jabatannya tidak akan memengaruhi sah-tidaknya pelantikan. "Tapi kami harapkan nanti Pak wali bisa hadir, saya pikir semua juga merasa prihatin dengan kejadian ini," katanya.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

**Isu Pemberitaan : Edi Sukamto dari Istana Group Ikut Diperiksa
KPK PERTIMBANGKAN IZIN DADA (21 Agustus 2013)**

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantas Korupsi masih menimbang pentingnya Wali Kota Bandung Dada Rosada hadir dalam pelantikan dan serah terima jabatan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018, 16 September mendatang. Kalau ketidakhadiran Dada tidak mengurangi sahnya acara, KPK tidak akan mengabulkan permintaan DPRD Kota Bandung untuk menghadirkan Dada yang saat ini ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.		
2.	"Akan dipelajari dulu sejauh mana pentingnya kehadiran DR dalam pelantikan itu, apakah wajib hukumnya atau tidak?" kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Sabtu (20/8/2013).		
3.	Johan mengatakan, sampai saat ini KPK belum menerima surat permintaan dari DPRD Kota Bandung yang meminta Dada diizinkan hadir dalam acara itu (Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan surat sudah dikirim ke KPK pada Senin 19/8/2013, malam).		
4.	Johan menjelaskan, KPK juga belum pernah mengabulkan permintaan untuk mengeluarkan seorang tahanan untuk menghadiri acara serah terima jabatan. "Belum ada yang seperti ini. Ada beberapa contoh, misalnya orangtuanya meninggal atau anggota keluarganya meninggal," kata Johan.		
5.	Kendati kasusnya berbeda, ada beberapa kepala daerah yang dilantik dan melantik pejabat saat terjerat kasus korupsi. Pada 2011, terdakwa kasus korupsi Yusak Yulowo dilantik oleh Gubernur Papua Bernabas Suebu sebagai bupati Boven Digul. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Papua untuk melantik Yusak dilakukan di Gedung Kementrian Dalam negeri, Jakarta. Hal itu karena Yusak sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang. Pelantikan itu mendapat pengawasan ketat dari Rutan Cipinang dan aparat penegak hukum lainnya.		
6.	Kasus lainnya, Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar yang berstatus sebagai tahanan melantik kepala dinas di Rutan Cipinang. Itu bisa terjadi lantaran Menteri Dalam negeri belum memberhentikan Jefferson.		
7.	Selasa (20/8/2013) kemarin, penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap Setyabudhi Tedjocahjono untuk tersangka Dada Rosada dan Edi Siswandi. Saksi-saksi yang diperiksa ialah Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Gunandhi Sukma Bhinekas, Asisten II Pemkot Bandung Ubad Bachtiar, dan Kepala Bagian Hukum pemkot Bandung Erik M Attauriq, ketiganya sudah diperiksa untuk empat tersangka lain.		
8.	Salah satu materi yang ditanyakan adalah urunan kepala dinas yang diduga sebagai sumber uang suap untuk Setyabudhi. "Tadi Cuma ditanya sejak kapan kenal Pak Dada. Bagaimana hubungannya dengan beliau. Tidak ada soal patungan," kata Gunandhi.		
9.	Selain tiga pejabat itu, KPK juga memeriksa Edi Sukamto. "Sebagai manajemen Istana Group," ujar Johan.		
10.	Menurut situs web Istana Group, Edi Sukamto adalah salah seorang pendiri kelompok usaha di bidang properti terkemuka di Bandung. Beberapa usaha yang dikelolanya adalah Pasar Baru Trade Center, BEC, IBCC, Pusat Belanja Balubur, ITC Kosambi, dan masih banyak lagi. Johan		

	tidak menjelaskan secara terperinci, mengapa Edi Sukanto menjadi saksi dalam penyidikan kasus ini.		
11.	Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, uang yang digunakan untuk menyuap Setyabudhi berasal dari 3 sumber. Yaitu patungan pejabat di Pemkot Bandung, pinjaman dari pihak ketiga, dan dari uang bansos yang berhasil dicairkan.		
12.	Sementara itu, suasana kerja dan pelayanan di Pemkot Bandung, Selasa, terpantau tetap normal. Meskipun terlontar keprihatinan dari beberapa staf dan pegawai negeri di lingkungan Pemkot Bandung, situasi tetap terlihat seperti biasa.		
13.	Meskipun demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung Bulgan Alamin mengakui adanya perbedaan suasana psikologis. "Suasana psikologis PNS ya prihatin, tapi pelayanan tetap seperti biasa," kata Bulgan.		
14.	Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan, layanan publik di Pemkot Bandung tidak akan terganggu menyusul dilakukannya penahanan terhadap Dada. "Karena masih ada wakilnya, Pak Ayi jadi masih berjalan dengan baik, karena yang penting layanan publik tidak terganggu. Pak Ayi akan jalan," kata Heryawan.		
15.	Heryawan pun menegaskan, tidak perlu ada pergantian sementara. Apalagi dalam waktu dekat wali kota dan wakil wali kota Bandung terpilih akan segera dilantik. "Yang pasti, ikuti saja proses hukum yang ada, karena ini sudah masuk keranah hukum, ikuti saja. Mengenai pergantian saya kira tidak perlu, kan ada wakil wali kota sebentar lagi juga akan dilantik," tuturnya.		
16.	Penahanan Dada juga dipastikan tidak akan memengaruhi rencana pelantikan wali kota Bandung yang baru. "Tidak mungkin mundur (jadwal pelantikannya) karena tanggal 16 merupakan batas akhir jabatan periode kepemimpinan Pak Dada dan pak Ayi," kata Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan.		
17.	Erwan mengatakan, telah mengirimkan surat kepada KPK senin malam. "Suaratnya berisi permohonan agar Pak Dada bisa hadir dalam pelantikan, sepertinya tidak lengkap kalau tidak ada kehadiran beliau (Dada Rosada)," ucapnya.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : PENAHANAN DADA DIPERPANJANG (7 September 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantas Korupsi memperpanjang penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang belum rampung. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penahanan Dada diperpanjang 40 hari.		
2.	"Kemarin baru ditahan untuk 20 hari, sekarang diperpanjang," kata Johan Budi, Jumat (6/9/2013).		
3.	Dada ditahan pada 19 Agustus lalu setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahanannya akan habis pada akhir pekan ini. Untuk keperluan perpanjangan masa tahanan itu, Dada dipanggil ke KPK. Sekitar satu jam Dada bertemu dengan penyidik. "Perpanjangan (penahanan)," kata Dada sesuai menjalani pemeriksaan.		
4.	Ditanya wartawan dengan berbagai pertanyaan, Dada tak banyak komentar. Dada hanya menanggapi pertanyaan wartawan soal kesannya mendekam di Rutan Cipinang. "Enak tidak enak ya," ujarnya sesaat sebelum memasuki mobil tahanan.		
5.	Sementara itu, KPK memastikan foto penggalan surat perintah penyidikan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Bupati Bogor, Rachmat Yasin palsu. KPK tidak pernah menerbitkan sprindik untuk kedua pejabat itu. Pengawas Internal KPK tengah		

	menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya surat palsu itu. Lembaga antirasuah itu tengah mempertimbangkan untuk melaporkan pelakunya ke polisi.		
6.	“Hari ini (Jumat, 6/9/2013) ada rapat membahas soal itu (foto penggalan sprindik), saya diperintahkan menjelaskan kepada media tadi disampaikan potongan salinan sprindik Jero Wacik adalah palsu,” kata Johan Budi. Demikian pula dengan sprindik yang ditunjukkan untuk Rachmat Yasin.		
7.	KPK dengan yakin menyebut surat itu palsu lantaran samapai saat ini KPK belum pernah menerbitkan sprindik atas nama kedua orang itu. “KPK belum mengeluarkan sprindik baru kasus SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan TPBU (Tempat Pemakaman Bukan Umum) di Kabupaten Bogor,” kata Johan.		
8.	Beredarnya surat palsu itu bermula ketika beberapa redaksi media massa dan wartawan menerima surat elektronik dari satgasmafia hukum@gmail.com . Surat elektronik itu berisi empat lampiran berisi foto dokumen yang mirip dengan redaksional sprindik yang diterbitkan KPK. Dua foto merupakan sprindik untuk Jero Wacik, dua foto lainnya berkaitan dengan Rachmat Yasin.		
9.	Di lampiran itu tertulis, KPK melakukan penyidikan terhadap Jero Wacik karena melakukan tindak pidana korupsi menerima suap atau janji berkaitan dengan proyek PT Kernel Oil Pte Ltd. Jero disangka dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Surat itu tampak meyakinkan dengan tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dilengkapi dengan stempel KPK. Tertulis Agustus 2013 dengan membiarkan tanggalnya kosong. Di sebelah kiri bawah, terdapat tulisan tanga dengan tinta hitam, “Tunggu Persetujuan Presiden (RII)”.		
10.	Surat untuk Rachmat kurang lebih sama, bedanya surat untuk Rachmat tak disertai tulisan tangan seperti surat untuk Jero. Dalam surat itu, Rachmat disangka dengan pasal yang sama, penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan izin lokasi pembangunan TPBU di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal surat itu 22 Mei 2013 dituis tangan.		
11.	Saat dikonfirmasi tentang hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membantah telah menandatangani sprindik itu. “Hati-hati! Setau saya belum ada tersangka lain (dalam kasus SKK Migas) selain tiga orang yang telah ditetapkan KPK,” kata Bambang Widjojanto dalam pesan singkatnya.		
12.	Menurut Johan, terdapat beberapa kejanggalan pada surat itu. Antara lain, foto yang beredar tidak menunjukkan surat itu secara utuh, sehingga yang terlihat hanya penggalannya saja. Selain itu, ada huruf yang berbeda, “Huruf ‘di Jakarta’ dan ‘Agustus’ itu berbeda,” ujarnya.		
13.	Johan mengatakan, beredarnya surel itu merupakan upaya kesengajaan untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini, kata Johan, Pengawas Internal KPK telah bergerak mencari orang yang bertanggung jawab. “Pengawas Internal turun mencari tahu siapa yang mengganggu itu,” katanya.		
14.	Johan menegaskan, KPK tidak akan membentuk Komite Etik untuk menyelesaikan persoalan surat palsu itu, sebab KPK memang tidak pernah menerbitkan sprindik itu. Hal itu berbeda dengan bocornya sprindik Anas Urbaningrum. “Kalau sprindik Anas yang bocor itu, KPK memang mengakui itu surat kami yang dibocorkan oleh pihak dalam. Sementara ini, kami belum pernah mengeluarkan sprindik atas nama Jero Wacik,” tuturnya.		
15.	Johan justru menyamakan kasus ini dengan surat panggilan saksi palsu yang pernah dikirimkan kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada. Dada pada 4 April lalu mendatangi KPK karena menerima surat panggilan sebagai saksi kasus suap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudhi Tedjocahjono yang menangani perkara dana bantuan sosial Kota Bandung. “Waktu itu pengawas Internal KPK juga menyelidiki,” ujarnya.		
16.	Sampai berita ini ditulis, pimpin KPK masih membahas langkah apa yang akan diambil selanjutnya. “Apakah perlu melapor ke polisi,” kata Johan.		
17.	Johan mengatakan sampai saat ini KPK belum berencana memanggil Jero dalam kasus suap Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini. “Kalau Sekjen Kementerian ESDM memang ada rencana, tapi belum tahu tanggal berapa,” ujarnya.		

Total Amount of		
Total Percentase of		

3) DIMENSI FAKTUALITAS, KATEGORI READABILITY

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori READABILITY		
		Informasi Berguna	Informasi Kurang Berguna	Informasi Tidak Berguna
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)			
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)			
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

B. INFORMATION VALUE

1) DIMENSI INFORMATION VALUE, KATEGORI DENSITY

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori DENSITY	
		Padat	Tidak Padat
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)		
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)		
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)		
Total Amount of			
Total Percentase of			

2) DIMENSI INFORMATION VALUE, KATEGORI BREADHT

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori BREADHT		
		Satu Sudut Pandang	Dua Sudut Pandang	Lebih dari Dua Sudut Pandang
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)			
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)			
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

3) **DIMENSI INFORMATION VALUE, KATEGORI DEPTH**

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori DEPTH		
		Mendalam	Kurang Mendalam	Tidak Mendalam
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)			
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)			
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

C. AKURASI

1) **DIMENSI AKURASI, KATEGORI VERIFIKASI FAKTA**

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

**Isu Pemberitaan : Wali Kota Bandung: Saya Tidak Menghilang
DADA DAN EDI JADI TERSANGKA (2 Juli 2013)**

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Wali Kota Bandung Dada Rosada disangka sebagai otak kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, hakim yang menangani perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Tetapi Dada tak sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi sebagai tersangka.		
2.	Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Dada dan edi sebagai tersangka. "Penyidik menyimpulkan DR selaku wali kota Bandung diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Johan, Senin (1/7/2013).		
3.	Pasal yang sama juga disangkakan kepada Edi. Dada dan Edi disangka telah menyuap Setyabudhi untuk mengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bansos.		
4.	Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tipikor menyebut, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.		
5.	Ditambah Dada dan Edi, jumlah tersangka dalam kasus suap bansos menjadi enam orang. Empat lainnya, Setyabudhi Tedjocahyono, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung dan anak buahnya Asep		

	Triana.		
10.	KPK sudah memanggil Dada sembilan kali dan Edi sedikitnya enam kali sebelum keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan, keduanya saling tuding. Menurut Dada, soal patungan itu jadi urusan Edi yang kala itu menjabat sebagai sekretaris daerah. Menurut Dada, Edi tak selalu melaporkan kegiatannya kepada Dada. Sementara menurut Edi, ada perintah dari Dada untuk mengoordinasikan pengumpulan uang.		
11.	Toto pernah mengaku pemberian uang pertama kalinya untuk memenuhi permintaan Setyabudhi diserahkan oleh Edi. Menurut Toto, ia hanya menyampaikan permintaan uang oleh Setyabudhi kepada Pemkot Bandung.		
12.	Usai pengumuman KPK, Edi Siswandi tidak dapat ditemui saat "PR" menyambangi rumahnya di Jalan Cijawura Girang, rumahnya tampak sepi. Empat orang terlihat berada di saung di halaman rumah, sementara dua mobil terparkir.		
13.	Lain Edi, lain Dada Rosada yang menggelar konferensi pers di rumah dinas di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Senin. Konferensi pers digelar dengan tujuan untuk meluruskan pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan Dada menghilang begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : DADA ROSADA BERAKHIR DI CIPINANG (20 Agustus 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Wali Kota Bandung Dada Rosada terancam tak bisa menghadiri pelantikan wali kota Bandung yang baru yang rencananya digelar 16 September mendatang. Soalnya, Dada keburu tersandung kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk pertama kalinya memeriksa Dada sebagai tersangka kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjocahjono, Senin (19/8/2013), tak membiarkan Dada pulang.		
2.	Setelah diperiksa sekitar enam jam, Dada dijebloskan ke Rumah Tahanan Cipinang di Jakarta. Baju putih bergaris yang dikenakan Dada saat datang ke KPK, sudah tertutup rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Meski begitu, Dada masih menubar senyum kepada puluhan wartawan yang menunggunya.		
3.	Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Dada ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan. Dada diduga telah menyuap Setyabudhi untuk memengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Dada terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.		
4.	Dada seharusnya diperiksa Jumat (16/8/2013), hari yang sama dengan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi yang berbuntut penahanan Edi di Rutan Salemba. Dada lolos dari penahanan karena ia memilih menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung ketimbang memenuhi panggilan KPK.		

5.	Ketidakhadiran Dada pada Jumat itu ditanyakan kepada saksi yang diperiksa kemarin.		
6.	Pemeriksaan terhadap Yosi hanya berlangsung kurang dari dua jam. Materi pemeriksaannya hampir sama dengan materi untuk keempat tersangka sebelumnya.		
7.	Selain Yosi, penyidik juga memeriksa tiga kepala dinas di Pemkot Bandung. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiandi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana, ketiganya sudah pernah diperiksa sebelumnya.		
8.	Begitu Dada resmi ditahan KPK, di rumahnya di Jalan Tirtasari II NO 12, Kota Bandung tak tampak kegiatan apa pun. Sejumlah mobil diparkir di depan rumah serta di garasi. Di dalam garasi ada tiga mobil, diantaranya Toyota Innova D 1701, dua mobil lainnya tertutup terpal. Menjelang pukul 21.00, satu per satu mobil yang terparkir di luar rumah, mulai meninggalkan tempatnya.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

**Isu Pemberitaan : Edi Sukanto dari Istana Group Ikut Diperiksa
KPK PERTIMBANGKAN IZIN DADA (21 Agustus 2013)**

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantas Korupsi masih menimbang pentingnya Wali Kota Bandung Dada Rosada hadir dalam pelantikan dan serah terima jabatan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018, 16 September mendatang. Kalau ketidakhadiran Dada tidak mengurangi sahnya acara, KPK tidak akan mengabaikan permintaan DPRD Kota Bandung untuk menghadirkan Dada yang saat ini ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.		
2.	Kendati kasusnya berbeda, ada beberapa kepala daerah yang dilantik dan melantik pejabat saat terjerat kasus korupsi. Pada 2011, terdakwa kasus korupsi Yusak Yulowo dilantik oleh Gubernur Papua Bernabas Suebu sebagai bupati Boven Digul. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Papua untuk melantik Yusak dilakukan di Gedung Kementerian Dalam negeri, Jakarta. Hal itu karena Yusak sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang. Pelantikan itu mendapat pengawasan ketat dari Rutan Cipinang dan aparat penegak hukum lainnya.		
3.	Kasus lainnya, Wali Kota Tomohon Jefferson Rumanjar yang berstatus sebagai tahanan melantik kepala dinas di Rutan Cipinang. Itu bisa terjadi lantaran Menteri Dalam negeri belum memberhentikan Jefferson.		
4.	Selasa (20/8/2013) kemarin, penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi dalam kasus suap Setyabudhi Tedjocahjono untuk tersangka Dada Rosada dan Edi Siswandi. Saksi-saksi yang diperiksa ialah Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Gunandhi Sukma Bhinekas, Asisten II Pemkot Bandung Ubad Bachtiar, dan Kepala Bagian Hukum pemkot Bandung Erik M Attauriq, ketiganya sudah diperiksa untuk empat tersangka lain.		
5.	Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, uang yang digunakan untuk menyuap Setyabudhi berasal dari 3 sumber. Yaitu patungan pejabat di Pemkot Bandung, pinjaman dari pihak ketiga, dan dari uang bansos		

	yang berhasil dicairkan.		
6.	Sementara itu, suasana kerja dan pelayanan di Pemkot Bandung, Selasa, terpantau tetap normal. Meskipun terlontar keprihatinan dari beberapa staf dan pegawai negeri di lingkungan Pemkot Bandung, situasi tetap terlihat seperti biasa.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : PENAHANAN DADA DIPERPANJANG (7 September 2013)

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantas Korupsi memperpanjang penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang belum rampung. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penahanan Dada diperpanjang 40 hari.		
2.	Dada ditahan pada 19 Agustus lalu setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahanannya akan habis pada akhir pekan ini. Untuk keperluan perpanjangan masa tahanan itu, Dada dipanggil ke KPK. Sekitar satu jam Dada bertemu dengan penyidik. "Perpanjangan (penahanan),"kata Dada sesuai menjalani pemeriksaan.		
3.	Sementara itu, KPK memastikan foto penggalan surat perintah penyidikan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Bupati Bogor, Rachmat Yasin palsu. KPK tidak pernah menerbitkan sprindik untuk kedua pejabat itu. Pengawas Internal KPK tengah menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya surat palsu itu. Lembaga antirasuah itu tengah mempertimbangkan untuk melaporkan pelakunya ke polisi.		
4.	Beredarnya surat palsu itu bermula ketika beberapa redaksi media massa dan wartawan menerima surat elektronik dari satgasmafiahukum@gmail.com . Surat elektronik itu berisi empat lampiran berisi foto dokumen yang mirip dengan redaksional sprindik yang diterbitkan KPK. Dua foto merupakan sprindik untuk Jero Wacik, dua foto lainnya berkaitan dengan Rachmat Yasin.		
5.	Di lampiran itu tertulis, KPK melakukan penyidikan terhadap Jero Wacik karena melakukan tindak pidana korupsi menerima suap atau janji berkaitan dengan proyek PT Kernel Oil Pte Ltd. Jero disangka dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Surat itu tampak meyakinkan dengan tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dilengkapi dengan stempel KPK. Tertulis Agustus 2013 dengan membiarkan tanggalnya kosong. Di sebelah kiri bawah, terdapat tulisan tanga dengan tinta hitam, "Tunggu Persetujuan Presiden (RII)".		
6.	Surat untuk Rachmat kurang lebih sama, bedanya surat untuk Rachmat tak disertai tulisan tangan seperti surat untuk Jero. Dalam surat itu, Rachmat disangka dengan pasal yang sama, penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan izin lokasi pembangunan TPBU di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, tanggal surat itu 22 Mei 2013 ditulis tangan.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

2) **DIMENSI AKURASI, KATEGORI *EYE WITNESS COMPARISONS***

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No.	Item Analisis	Konstruksi Kategori EYE WITNESS COMPARISONS		
		Tidak ada saksi	Ada Saksi	
			Saksi Diungkapkan Jati Dirinya	Saksi Tidak Diungkapkan Jati Dirinya
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)			
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)			
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)			
Total Amount Of				
Total Percentase Of				

D. COMPLETENESS

1) **DIMENSI COMPLETENESS, KATEGORI KELENGKAPAN 5W+1H**

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No.	Item Analisis	Konstruksi Kategori KELENGKAPAN UNSUR BERITA	
		Berita Lengkap Mengandung Unsur 5W + 1H	Berita Tidak Lengkap Mengandung Unsur 5W + 1H
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)		
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)		
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)		
Total Amount Of			
Total Percentase Of			

2) **DIMENSI COMPLETENESS, DIMENSI REFERENCE**

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori REFERENCE	
		Ada Reference	Tidak Ada Reference
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)		
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)		
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)		
Total Amount of			
Total Percentase of			

E. **RELEVANCE**

1) **DIMENSI RELEVANCE, KATEGORI RELAVITE SALIENCE**

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No.	Item Analisis	Konstruksi Kategori RELATIVE SALIENCE	
		Relevan	Tidak Relevan
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)		
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)		
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)		
Total Amount Of			
Total Percentase Of			

2) DIMENSI RELEVANCE, KATEGORI *RELATIVE PRIORITY*

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Pikiran Rakyat

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori <i>RELATIVE PRIORITY</i>		
		Penting	Kurang Penting	Tidak Penting
1.	Dada dan Edi Jadi Tersangka (Selasa, 2 Juli 2013)			
2.	Dada Rosada Berakhir di Cipinang (Selasa, 20 Agustus 2013)			
3.	KPK Pertimbangkan Izin Dada (Rabu, 21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang (Sabtu, 7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				



• **SURATKABAR TRIBUN JABAR**

A. FAKTUALITAS

1) DIMENSI FAKTUALITAS, KATEGORI FAKTUALITAS

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : EDI SISWANDI TERSANGKA SUAP (2 Juli 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswandi sebagai tersangka kasus suap dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudhi Tedjocahyono. KPK juga menetapkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada sebagai tersangka dalam kasus yang sama.				
2.	Diduga, Edi bersama Dada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Setyabudhi terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung.				
3.	“Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan kasus pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Bandung, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Disimpulkan, ES (Edi Siswandi) selaku Sekda Bandung sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (1/7).				
4.	Menurut Johan, Edi disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 Ayat 1, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara.				
5.	Adapun Pasal 6 Ayat 1 yang memuat hukuman paling berat, berbunyi dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili.				
6.	Menurut Johan, penetapan Edi sebagai tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan penyuapan kepada hakim PN Bandung Setyabudhi Tedjocahyono yang menjerat Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat, dan pria bernama Asep Triana yang diduga orang suruhan Toto.				
7.	Adapun Styabudhi, Toto, Hery, dan Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Toto mengaku dimintai tolong Setyabudhi untuk meminta uang kepada Pemkot Bandung. Menurut Toto, setelah meminta uang kepada pemkot, dia pun menerima uang dari Sekda Bandung.				
8.	Edi Siswa yang juga mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung itu, belum bisa dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Hubungan telepon maupun pesan singkat (SMS) yang dikirim <i>tribun</i> beberapa kali, tidak dibalas				

	Edi.				
9.	Hingga kemarin keberadaan Edi Siswandi masih belum jelas. Saat ditelusuri ke rumah pribadinya di Jalan Cijawura Girang II Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, wartawan hanya bertemu seorang penjaga rumah yang mengaku bernama Epan.				
10.	Menurut lelaki paruh baya ini, sang majikan sudah pergi meninggalkan rumah sejak siang sekitar pukul 11.00 WIB. Di dalam rumah pun tidak ada istri, anak, atau keluarganya. "Saya datang siang, di rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Katanya sudah pergi sejak tadi siang," kata Epan seraya mengaku tidak mengetahui kalau Edi sudah ditetapkan sebagai tersangka.				
11.	Tetapi penetapan Edi dan Dada sebagai tersangka, wali Kota Bandung itu enggan berkomentar. "Saya tidak mau komentar soal itu ya," kata Dada saat ditemui di pendopo, Bandung Senin. Dia pun enggan komentar banyak soal kasus yang melilitnya oleh lembaga antirasuah tersebut.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : AKHIRNYA PAKAI ROMPI ORANYE

Dada Ditahan KPK DI Rutan Cipinang (20 Agustus 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Bandung Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuaipan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintahan Kota Bandung.				
2.	"Ditahan selama 20 hari pertama, di Cipinang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, kemarin.				
3.	Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap tersebut. Dada ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka selama lebih kurang tujuh jam.				
4.	Dia keluar dari Gedung KPK dan masuk ke mobil tahanan sekitar pukul 16.40. Saat keluar dari Gedung KPK, Dada tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Ia tidak berkomentar seputar penahanannya.				
5.	"Nanti, nanti, pada saatnya," ujar Dada sembari menembus kerumunan wartawan.				
6.	Dada pun sempat mengangkat kedua tangannya seatas Dada seolah menolak rentetan pertanyaan wartawan yang diajukan kepadanya.				
7.	Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, kemarin pagi, Dada mengaku siap ditahan.				
8.	Orang nomor satu di Bandung ini juga membantah dikabarkan menghilang saat dipanggil KPK pada jumat (16/8).				
9.	Saat tiba di Gedung KPK, Dada sempat bersalaman dengan				

	beberapa anak buahnya yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Mereka yang diperiksa adalah Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Yosi Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana.				
10.	Ditemui wartawan di kantor KPK, Jakarta, pengacara Dada Rosada, Abidin, menyatakan, Dada siap membongkar keterlibatan hakim lain dalam dugaan suap pengurusan perkara bansos Pemerintah Kota Bandung yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.				
11.	“Pak Dada siap kooperatif. Nanti akan dia sampaikan tiga hal, yang dilihat sendiri, dialami sendiri, didengar sendiri. Soal hakim lain, dia akan menyampaikan apa adanya, tidak bermaksud menyalahkan orang lain,” kata Abidin.				
12.	Tentang penahanan, Abidin mengaku sudah berkoordinasi dengan kliennya. Dia mengatakan Dada sudah memahaminya. “Dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” ujarnya.				
13.	Setiap konsultasi, kata Abidin, Dada sudah menceritakan apa yang diketahuinya. Yang jelas, yang meminta uang untuk diberikan kepada hakim adalah terdakwa Toto Hutagalung. Dia mengklaim, Dada tidak pernah memberikan uang suap ke siapa pun.				
14.	“Awalnya minta Rp. 3 miliar. Pak Dada tanya siapa itu yang minta. Tanya saja X. Saya sebut saja X. Itu permintaan dari hakim katanya. Setelah itu Pak Toto sudah koordinasi di bawah,” ujarnya.				
15.	Menurut dia, tidak ada fakta pengumpulan uang dari kepala dinas (kadis) se-SKPD Kota Bandung. Awalnya, tutur dia, Totolah yang meminta ke satu kadis. Tapi dijawab harus atas izin Dada. Di sisi lain, kliennya tidak pernah menyetujui permintaan uang tersebut. Dia menambahkan, tidak melihat fakta bahwa kliennya memberikan kartu kredit untuk terdakwa Toto. “Tidak ada fakta itu,”ujarnya.				
16.	Sedianya, pekan lalu Dada diperiksa sebagai tersangka bersamaan dengan pemeriksaan mantan sekretaris daerah pemkot Edi Siswandi. Namun, Dada berhalangan hadir dengan alasan mengikuti rapat paripurna di DPRD di Bandung. Adapun Edi langsung ditahan sesuai diperiksa Jumat pekan lalu.				
17.	Dalam kasus ini, Dada dan Edi diduga bersama-sama menyuap Setyabudi Tejocahyono. KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap. Lembaga antikorupsi itu pun lebih dulu menjerat orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Hery Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto. Kini, KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut yang memungkinkan adanya tersangka baru.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : DPRD MINTA KPK PINJAMKAN DADA

Untuk Hadiri Pelantikan Wali Kota Terpilih (21 Agustus 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan mengaku telah mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemberitahuan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengadakan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota Bandung periode 2013-2018.				
2.	“Saya telah membuat surat ke KPK bahwa kita akan melaksanakan serah terima jabatan wali kota 16 September 2013 ini. Suratnya sudah dikirimkan kemarin,” kata Erwan saat ditemui se usai peringatan satu abad Paguyuban Pasundan di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (20/8).				
3.	Menurut Erwan, surat tersebut diajukan ke KPK sekaligus untuk meminjam Wali Kota Bandung Dada Rosada agar diizinkan untuk menghadiri pelantikan pasangan wakil wali kota Bandung terpilih, Ridwan Kamil dan Oded Danial.				
4.	“Saya akan berusaha untuk meminjam Pak Dada ke KPK supaya pada saat pelantikan Pak Dada bisa hadir. Ya, mudah-mudahan bisa ditanggguhkan (penahanan),” tuturnya.				
5.	KPK menahan Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuaian kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.				
6.	Menurut juru bicara KPK Johan Budi, KPK belum akan memberikan keputusan apakah akan memberikan izin atau tidak, kepada Dada. “Nanti dipelajari dulu suratnya, sejauh mana pentingnya kehadiran DR di acara itu. Nanti dari hasil analisis, baru disampaikan,” kata Johan di kantor KPK, kemarin.				
7.	Sejauh ini, kata Johan, KPK belum menerima surat permohonan tersebut. Karena itu, KPK akan menunggu terlebih dahulu. “Sepanjang tingkat kepentingannya tidak wajib, tentu ditolak,” katanya.				
8.	Pascapenahanan Dada, suasana lingkungan Pemerintah Kota Bandung tak berbeda dengan hari sebelumnya. “Semua kegiatan tak ada yang terganggu baik yang ada di lingkungan Balai Kota maupun di luar Balai Kota,” ujar Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Disinkom) Kota Bandung Bulgan Alamin, kemarin.				
9.	Walau begitu, para PNS di jajaran Pemkot terlihat prihatin. Ini terlihat dari pembicaraan dan status Blackberry yang hampir semuanya menyampaikan keprihatinan.				
10.	Kepala Seksi Pemberitaan Meiwan Kartiwa mengaku sangat terpuak dan merasa kehilangan karena setiap harinya selalu bersama. “Mudah-mudahan Pak Dada tabah menerima cobaan,” ujar Meiwan, yang selalu meliput kegiatan Dada baik siang maupun malam.				

11.	Rasa prihatin juga disampaikan salah satu staf Sekretaris Pribadi Wali Kota, nandang. “Sedih sat tahu Bapak ditahan, pas nonton TV. Bagaimanapun juga beliau atasan saya,” ujar Nandang, yang sudah menjadi staf selama dua tahun.				
12.	“Pak Dada dekat dengan karyawan, hafal nama-nama staf di sini. Ya, suka nyapa saya,” ujar Nandang, yang berharap keluarga Dada dikuatkan dan diberi kesabaran.				
13.	Mahkamah Agung (MA) menyerahkan seluruh proses hukum para hakim yang disebut oleh mantan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi ke KPK. Termasuk juga Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso yang disebut menerima suap dari Dada Rosada.				
14.	“Bila ada hakim atau oknum pengadilan yang diduga dan terbukti korupsi, MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan <i>detik.com</i> , kemarin.				
15.	Singgih disebut menerima uang suap dari Dada Rosada dan Edi Siswadi melalui Toto Hutagalung yang diserahkan pada terdakwa Setyabudi Tejocahyono. Dalam dakwaan Setyabudi, jaksa menyebut Singgih mendapat jatah US\$ 15 ribu, sementara dua anggota majelis hakim perkara korupsi bansos, yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, mendapat masing-masing US\$ 18.300.				
16.	“Apalagi ini sudah disebut di dakwaan. MA komitmen bekerja sama memberantas korupsi di semua aspek,” kata Ridwan.				
17.	Desakan pengusutan hakim selain Setyabudi juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Hukum dan Publik, Erhan Jaya Putra SH MH. “Menurut pengakuan Setyabudi yang disampaikan oleh jaksa itu kan cukup jelas siapa saja nama-nama hakim yang telah menerima uang itu. Mengapa hakim-hakim itu tidak segera diusut dan dijadikan tersangka?” kata Erlan.				
18.	Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (15/8), terungkap pengakuan Setyabudi kepada penyidik KPK bahwa uang yang diterimanya dari Toto Hutagalung sebesar Rp 1,8 miliar itu sebagian diantaranya diserahkan kepada dua hakim anggota yang menyidangkan kasus bansos, yakni Ramlan Comel dan Djodjo Djohari.				
19.	Baik Ramlan Comel maupun Djodjo Djohari hingga kemarin enggan menjawab pertanyaan <i>Tribun</i> tentang tuduhan bahwa keduanya telah menerima uang suap dari Toto Hutagalung yang diserahkan oleh Setyabudi.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : PENAHANAN DADA DIPERPANJANG 40 HARI (7 September 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori FAKTUALITAS			
		Fakta	Opini	Campuran Fakta Opini	Bukan Fakta, Bukan Opini
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan				

	Wali Kota Bandung Dada Rosada, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Setyabudi Tejocahyono. Dada ditahan untuk 40 hari ke depan terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.				
2.	“Diperpanjang (penahanannya),” kata Dada saat menjawab pertanyaan wartawan setelah diperiksa penyidik KPK, Jumat (6/9).				
3.	Menurut jadwal pemeriksaan KPK, Dada kemarin diperiksa sebagai tersangka. Mengenakan rompi tahanan, Dada masuk ke gedung pukul 10.33. sekitar setengah jam kemudian, ia keluar.				
4.	Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, menegaskan perpanjangan masa penahanan itu. Menurut dia, perpanjangan dilakukan per 6 September 2013. “Benar terhadap tersangka DR (Dada Rosada) diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan,” katanya.				
5.	Dada resmi ditahan di Rutan Cipinang pada 19 Agustus lalu. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung bersama mantan sekretaris daerah Bandung, Edi Siswadi. KPK menjerat mereka dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.				
6.	Kemarin, KPK kembali memanggil Dada sebagai tersangka. Selain Dada, penyidik memanggil seorang PNS Pemerintah Kota Bandung, Rochman, yang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas para tersangka kasus tersebut.				
7.	“Rochman diperiksa sebagai saksi,” kata Priharsa. Disinyalir, pemeriksaan Rochman dilakukan guna menelisik lebih jauh urunan dana yang diduga diberikan kepada Setyabudi.				
8.	Dihubungi via telepon, penasihat hukum Dada, Abidin, mengatakan, perpanjangan penahana Dada dilakukan karena keterangannya masih dibutuhkan. “Perpanjangan itu hak KPK, mungkin karena keterangan Pak Dada masih dibutuhkan,” ujar Abidin saat dihubungi <i>Tribun</i> kemarin.				
9.	Sebagai penasihat hukum, ia sudah mengajukan hak-hak Dada, di antaranya pemeriksaan kesehatan dan penanguhan tahanan. “Penanguhan tahanan sudah diajukan oleh berbagai elemen tidak hanya dari Dada dan keluarganya, tapi juga ormas Islam, alim ulama, LSM, tokoh masyarakat, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, dan jelas dari tim penasihat hukum sudah mengajukan. Namun, belum ada balasan dari KPK.” Ujar Abidin.				
10.	Rencananya, Abidin akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap KPK sekaligus menyerahkan surat undangan pelantikan wali kota Bandung terpilih, serah terima jabatan dan acara pisah sambut. “Ada surat permohonan agar Dada diizinkan mengikuti rangkaian acara serah terima jabatan dan pisah sambut dan surat undangan untuk KPK,” ujar Abidin.				
11.	Abidin pun menyampaikan pesan Dada yang mempertanyakan berita tentang pernyataan Dada yang akan buka-bukaan masalah dana bantuan sosial, khususnya aliran dana bansos ke dewan.				
12.	“Pak Dada tak pernah bicara akan membuka maslaah aliran bansos, apalagi ke anggota dewan, karena kasus yang dihadapi				

	Dada ini kasus suap,” ujar Abidin.				
13.	Menurut Abidin, dalam pemeriksaan di KPK tak ada pertanyaan masalah aliran bansos, baik dalam BAP maupun kepada wartawan. “Pak Dada tak pernah bicara akan membuka aliran bansos,” ujar Abidin.				
Total Amount of					
Total Percentase of					

2) DIMENSI FAKTUALITAS, KATEGORI CHECKABILITY

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : EDI SISWANDI TERSANGKA SUAP (2 Juli 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswandi sebagai tersangka kasus suap dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudhi Tedjocahyono. KPK juga menetapkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada sebagai tersangka dalam kasus yang sama.		
2.	Diduga, Edi bersama Dada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Setyabudhi terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung.		
3.	“Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan kasus pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Bandung, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Disimpulkan, ES (Edi Siswandi) selaku Sekda Bandung sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (1/7).		
4.	Menurut Johan, Edi disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 Ayat 1, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara.		
5.	Adapun Pasal 6 Ayat 1 yang memuat hukuman paling berat, berbunyi dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili.		
6.	Menurut Johan, penetapan Edi sebagai tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan penyuapan kepada hakim PN Bandung Setyabudhi Tedjocahyono yang menjerat Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat, dan pria bernama Asep Triana yang diduga orang suruhan Toto.		
7.	Adapun Setyabudhi, Toto, Hery, dan Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Sesuai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Toto mengaku dimintai tolong Setyabudhi untuk meminta uang kepada Pemkot Bandung. Menurut Toto, setelah meminta uang kepada Pemkot, dia pun menerima uang dari Sekda Bandung.		
8.	Edi Siswa yang juga mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung itu, belum bisa dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Hubungan telepon maupun pesan singkat (SMS) yang dikirim <i>tribun</i> beberapa kali, tidak dibalas Edi.		
9.	Hingga kemarin keberadaan Edi Siswandi masih belum jelas. Saat ditelusuri ke rumah pribadinya di Jalan Cijawura Girang II Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, wartawan hanya bertemu seorang penjaga rumah yang mengaku bernama Epan.		

10.	Menurut lelaki paruh baya ini, sang majikan sudah pergi meninggalkan rumah sejak siang sekitar pukul 11.00 WIB. Di dalam rumah pun tidak ada istri, anak, atau keluarganya. "Saya datang siang, di rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Katanya sudah pergi sejak tadi siang," kata Epan seraya mengaku tidak mengetahui kalau Edi sudah ditetapkan sebagai tersangka.		
11.	Tetapi penetapan Edi dan Dada sebagai tersangka, wali Kota Bandung itu enggan berkomentar. "Saya tidak mau komentar soal itu ya," kata Dada saat ditemui di pendopo, Bandung Senin. Dia pun enggan komentar banyak soal kasus yang melilitnya oleh lembaga antirasuah tersebut.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : AKHIRNYA PAKAI ROMPI ORANYE

Dada Ditahan KPK DI Rutan Cipinang (20 Agustus 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Bandung Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintahan Kota Bandung.		
2.	"Ditahan selama 20 hari pertama, di Cipinang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, kemarin.		
3.	Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap tersebut. Dada ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka selama lebih kurang tujuh jam.		
4.	Dia keluar dari Gedung KPK dan masuk ke mobil tahanan sekitar pukul 16.40. Saat keluar dari Gedung KPK, Dada tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Ia tidak berkomentar seputar penahanannya.		
5.	"Nanti, nanti, pada saatnya," ujar Dada sembari menembus kerumunan wartawan.		
6.	Dada pun sempat mengangkat kedua tangannya seatas Dada seolah menolak rentetan pertanyaan wartawan yang diajukan kepadanya.		
7.	Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, kemarin pagi, Dada mengaku siap ditahan.		
8.	Orang nomor satu di Bandung ini juga membantah dikabarkan menghilang saat dipanggil KPK pada jumat (16/8).		
9.	Saat tiba di Gedung KPK, Dada sempat bersalaman dengan beberapa anak buahnya yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Mereka yang diperiksa adalah Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Yosi Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terhadap Kota Bandung Dandan Riza Wardana.		
10.	Ditemui wartawan di kantor KPK, Jakarta, pengacara Dada Rosada, Abidin, menyatakan, Dada siap membongkar keterlibatan hakim lain dalam dugaan suap pengurusan perkara bansos Pemerintah Kota Bandung yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.		
11.	"Pak Dada siap kooperatif. Nanti akan dia sampaikan tiga hal, yang dilihat sendiri, dialami sendiri, didengar sendiri. Soal hakim lain, dia akan menyampaikan apa adanya, tidak bermaksud menyalahkan orang lain," kata Abidin.		
12.	Tentang penahanan, Abidin mengaku sudah berkoordinasi dengan kliennya. Dia mengatakan Dada sudah memahaminya. "Dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum," ujarnya.		
13.	Setiap konsultasi, kata Abidin, Dada sudah menceritakan apa yang diketahuinya. Yang jelas, yang meminta uang untuk diberikan kepada hakim adalah terdakwa Toto Hutagalung. Dia mengklaim, Dada tidak pernah memberikan uang suap ke siapa pun.		
14.	"Awalnya minta Rp. 3 miliar. Pak Dada tanya siapa itu yang minta. Tanya saja X. Saya sebut		

	saja X. Itu permintaan dari hakim katanya. Setelah itu Pak Toto sudah koordinasi di bawah,” ujarnya.		
15.	Menurut dia, tidak ada fakta pengumpulan uang dari kepala dinas (kadis) se-SKPD Kota Bandung. Awalnya, tutur dia, Totolah yang meminta ke satu kadis. Tapi dijawab harus atas izin Dada. Di sisi lain, kliennya tidak pernah menyetujui permintaan uang tersebut. Dia menambahkan, tidak melihat fakta bahwa kliennya memberikan kartu kredit untuk terdakwa Toto. “Tidak ada fakta itu,”ujarnya.		
16.	Sedianya, pekan lalu Dada diperiksa sebagai tersangka bersamaan dengan pemeriksaan mantan sekretaris daerah pemkot Edi Siswandi. Namun, Dada berhalangan hadir dengan alasan mengikuti rapat paripurna di DPRD di Bandung. Adapun Edi langsung ditahan sesuai diperiksa Jumat pekan lalu.		
17.	Dalam kasus ini, Dada dan Edi diduga bersama-sama menyuap Setyabudi Tejocahyono. KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap. Lembaga antikorupsi itu pun lebih dulu menjerat orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Hery Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto. Kini, KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut yang memungkinkan adanya tersangka baru.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : DPRD MINTA KPK PINJAMKAN DADA
Untuk Hadiri Pelantikan Wali Kota Terpilih (21 Agustus 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan mengaku telah mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemberitahuan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengadakan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota Bandung periode 2013-2018.		
2.	“Saya telah membuat surat ke KPK bahwa kita akan melaksanakan serah terima jabatan wali kota 16 September 2013 ini. Suratnya sudah dikirimkan kemarin,” kata Erwan saat ditemui sesuai peringatan satu abad Paguyuban Pasundan di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (20/8).		
3.	Menurut Erwan, surat tersebut diajukan ke KPK sekaligus untuk meminjam Wali Kota Bandung Dada Rosada agar diizinkan untuk menghadiri pelantikan pasangan wakil wali kota Bandung terpilih, Ridwan Kamil dan Oded Danial.		
4.	“Saya akan berusaha untuk meminjam Pak Dada ke KPK supaya pada saat pelantikan Pak Dada bisa hadir. Ya, mudah-mudahan bisa ditangguhkan (penahanan),” tuturnya.		
5.	KPK menahan Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.		
6.	Menurut juru bicara KPK Johan Budi, KPK belum akan memberikan keputusan apakah akan memberikan izin atau tidak, kepada Dada. “Nanti dipelajari dulu suratnya, sejauh mana pentingnya kehadiran DR di acara itu. Nanti dari hasil analisis, baru disampaikan,” kata Johan di kantor KPK, kemarin.		
7.	Sejauh ini, kata Johan, KPK belum menerima surat permohonan tersebut. Karena itu, KPK akan menunggu terlebih dahulu. “Sepanjang tingkat kepentingannya tidak wajib, tentu ditolak,” katanya.		

8.	Pascapenahanan Dada, suasana lingkungan Pemerintah Kota Bandung tak berbeda dengan hari sebelumnya. “Semua kegiatan tak ada yang terganggu baik yang ada di lingkungan Balai Kota maupun di luar Balai Kota,” ujar Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Disinkom) Kota Bandung Bulgan Alamin, kemarin.		
9.	Walau begitu, para PNS di jajaran Pemkot terlihat prihatin. Ini terlihat dari pembicaraan dan status Blackberry yang hampir semuanya menyampaikan keprihatinan.		
10.	Kepala Seksi Pemberitaan Meiwan Kartiwa mengaku sangat terpukul dan merasa kehilangan karena setiap harinya selalu bersama. “Mudah-mudahan Pak Dada tabah menerima cobaan,” ujar Meiwan, yang selalu meliput kegiatan Dada baik siang maupun malam.		
11.	Rasa prihatin juga disampaikan salah satu staf Sekretaris Pribadi Wali Kota, nandang. “Sedih sat tahu Bapak ditahan, pas nonton TV. Bagaimanapun juga beliau atasan saya,” ujar Nandang, yang sudah menjadi staf selama dua tahun.		
12.	“Pak Dada dekat dengan karyawan, hafal nama-nama staf di sini. Ya, suka nyapa saya,” ujar Nandang, yang berharap keluarga Dada dikuatkan dan diberi kesabaran.		
13.	Mahkamah Agung (MA) menyerahkan seluruh proses hukum para hakim yang disebut oleh mantan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi ke KPK. Termasuk juga Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso yang disebut menerima suap dari Dada Rosada.		
14.	“Bila ada hakim atau oknum pengadilan yang diduga dan terbukti korupsi, MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan <i>detik.com</i> , kemarin.		
15.	Singgih disebut menerima uang suap dari Dada Rosada dan Edi Siswadi melalui Toto Hutagalung yang diserahkan pada terdakwa Setyabudi Tejocahyono. Dalam dakwaan Setyabudi, jaksa menyebut Singgih mendapat jatah US\$ 15 ribu, sementara dua anggota majelis hakim perkara korupsi bansos, yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, mendapat masing-masing US\$ 18.300.		
16.	“Apalagi ini sudah disebut di dakwaan. MA komitmen bekerja sama memberantas korupsi di semua aspek,” kata Ridwan.		
17.	Desakan pengusutan hakim selain Setyabudi juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Hukum dan Publik, Erhan Jaya Putra SH MH. “Menurut pengakuan Setyabudi yang disampaikan oleh jaksa itu kan cukup jelas siapa saja nama-nama hakim yang telah menerima uang itu. Mengapa hakim-hakim itu tidak segera diusut dan dijadikan tersangka?” kata Erlan.		
18.	Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (15/8), terungkap pengakuan Setyabudi kepada penyidik KPK bahwa uang yang diterimanya dari Toto Hutagalung sebesar Rp 1,8 miliar itu sebagian diantaranya diserahkan kepada dua hakim anggota yang menyidangkan kasus bansos, yakni Ramlan Comel dan Djodjo Djohari.		
19.	Baik Ramlan Comel maupun DjoDjo Djohari hingga kemarin enggan menjawab pertanyaan <i>Tribun</i> tentang tuduhan bahwa keduanya telah menerima uang suap dari Toto Hutagalung yang diserahkan oleh Setyabudi.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : PENAHANAN DADA DIPERPANJANG 40 HARI (7 September 2013)

Dimuat di : *Tribun Jabar*

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori CHECKABILITY	
		Bisa Diverifikasi	Tidak Bisa Diverifikasi
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Setyabudi Tejocahyono. Dada ditahan untuk 40 hari ke depan terkait dengan kasus dugaan suap		

	pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.		
2.	“Diperpanjang (penahanannya),” kata Dada saat menjawab pertanyaan wartawan setelah diperiksa penyidik KPK, Jumat (6/9).		
3.	Menurut jadwal pemeriksaan KPK, Dada kemarin diperiksa sebagai tersangka. Mengenakan rompi tahanan, Dada masuk ke gedung pukul 10.33. sekitar setengah jam kemudian, ia keluar.		
4.	Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, menegaskan perpanjangan masa penahanan itu. Menurut dia, perpanjangan dilakukan per 6 September 2013. “Benar terhadap tersangka DR (Dada Rosada) diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan,” katanya.		
5.	Dada resmi ditahan di Rutan Cipinang pada 19 Agustus lalu. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung bersama mantan sekretaris daerah Bandung, Edi Siswadi. KPK menjerat mereka dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.		
6.	Kemarin, KPK kembali memanggil Dada sebagai tersangka. Selain Dada, penyidik memanggil seorang PNS Pemerintah Kota Bandung, Rochman, yang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas para tersangka kasus tersebut.		
7.	“Rochman diperiksa sebagai saksi,” kata Priharsa. Disinyalir, pemeriksaan Rochman dilakukan guna menelisik lebih jauh urunan dana yang diduga diberikan kepada Setyabudi.		
8.	Dihubungi via telepon, penasihat hukum Dada, Abidin, mengatakan, perpanjangan penahana Dada dilakukan karena keterangannya masih dibutuhkan. “Perpanjangan itu hak KPK, mungkin karena keterangan Pak Dada masih dibutuhkan,” ujar Abidin saat dihubungi <i>Tribun</i> kemarin.		
9.	Sebagai penasihat hukum, ia sudah mengajukan hak-hak Dada, di antaranya pemeriksaan kesehatan dan penangguhan tahanan. “Penangguhan tahanan sudah diajukan oleh berbagai elemen tidak hanya dari Dada dan keluarganya, tapi juga ormas Islam, alim ulama, LSM, tokoh masyarakat, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, dan jelas dari tim penasihat hukum sudah mengajukan. Namun, belum ada balasan dari KPK.” Ujar Abidin.		
10.	Rencananya, Abidin akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap KPK sekaligus menyerahkan surat undangan pelantikan wali kota Bandung terpilih, serah terima jabatan dan acara pisah sambut. “Ada surat permohonan agar Dada diizinkan mengikuti rangkaian acara serah terima jabatan dan pisah sambut dan surat undangan untuk KPK,” ujar Abidin.		
11.	Abidin pun menyampaikan pesan Dada yang mempertanyakan berita tentang pernyataan Dada yang akan buka-bukaan masalah dana bantuan sosial, khususnya aliran dana bansos ke dewan.		
12.	“Pak Dada tak pernah bicara akan membuka masalah aliran bansos, apalagi ke anggota dewan, karena kasus yang dihadapi Dada ini kasus suap,” ujar Abidin.		
13.	Menurut Abidin, dalam pemeriksaan di KPK tak ada pertanyaan masalah aliran bansos, baik dalam BAP maupun kepada wartawan. “Pak Dada tak pernah bicara akan membuka aliran bansos,” ujar Abidin.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

3) DIMENSI FAKTUALITAS, KATEGORI READABILITY

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori READABILITY		
		Informasi Berguna	Informasi Kurang Berguna	Informasi Tidak Berguna
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)			
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)			
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

B. INFORMATION VALUE

1) DIMENSI INFORMATION VALUE, KATEGORI DENSITY

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori DENSITY	
		Padat	Tidak Padat
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)		
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)		
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)		
Total Amount of			
Total Percentase of			

2) DIMENSI INFORMATION VALUE, KATEGORI BREADHT

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori BREADHT		
		Satu Sudut Pandang	Dua Sudut Pandang	Lebih dari Dua Sudut Pandang
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)			
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)			
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

3) **DIMENSI INFORMATION VALUE, KATEGORI DEPTH**

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori DEPTH		
		Mendalam	Kurang Mendalam	Tidak Mendalam
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)			
3.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)			
4.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)			
6.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

C. AKURASI

1) **DIMENSI AKURASI, KATEGORI VERIFIKASI FAKTA**

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : EDI SISWANDI TERSANGKA SUAP (2 Juli 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa di Verifikasi	Tidak Bisa di Verifikasi
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswandi sebagai tersangka kasus suap dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudhi Tedjocahyono. KPK juga menetapkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada sebagai tersangka dalam kasus yang sama.		
2.	Diduga, Edi bersama Dada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Setyabudhi terkait kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung.		
3.	Adapun Pasal 6 Ayat 1 yang memuat hukuman paling berat, berbunyi dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta, setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili.		
7.	Adapun Styabudhi, Toto, Hery, dan Asep sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Toto mengaku dimintai tolong Setyabudhi untuk meminta uang kepada Pemkot Bandung. Menurut Toto, setelah meminta uang kepada pemkot, dia pun menerima uang dari Sekda Bandung.		
8.	Edi Siswandi yang juga mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung itu, belum bisa dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Hubungan telepon maupun pesan singkat (SMS) yang dikirim <i>tribun</i> beberapa kali, tidak dibalas Edi.		
9.	Hingga kemarin keberadaan Edi Siswandi masih belum jelas. Saat ditelusuri ke rumah pribadinya di Jalan Cijawura Girang II Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, wartawan hanya bertemu seorang penjaga rumah yang mengaku bernama Epan.		

Total Amount of		
Total Percentase of		

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : AKHIRNYA PAKAI ROMPI ORANYE

Dada Ditahan KPK DI Rutan Cipinang (20 Agustus 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa di Verifikasi	Tidak Bisa di Verifikasi
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Bandung Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuiapan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintahan Kota Bandung.		
2.	Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap tersebut. Dada ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka selama lebih kurang tujuh jam.		
3.	Dia keluar dari Gedung KPK dan masuk ke mobil tahanan sekitar pukul 16.40. Saat keluar dari Gedung KPK, Dada tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Ia tidak berkomentar seputar penahanannya.		
4.	Dada pun sempat mengangkat kedua tangannya seatas Dada seolah menolak rentetan pertanyaan wartawan yang diajukan kepadanya.		
5.	Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, kemarin pagi, Dada mengaku siap ditahan.		
6.	Orang nomor satu di Bandung ini juga membantah dikabarkan menghilang saat dipanggil KPK pada jumat (16/8).		
7.	Saat tiba di Gedung KPK, Dada sempat bersalaman dengan beberapa anak buahnya yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Mereka yang diperiksa adalah Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Yosi Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana.		
8.	Sedianya, pekan lalu Dada diperiksa sebagai tersangka bersamaan dengan pemeriksaan mantan sekretaris daerah pemkot Edi Siswandi. Namun, Dada berhalangan hadir dengan alasan mengikuti rapat paripurna di DPRD di Bandung. Adapun Edi langsung ditahan se usai diperiksa Jumat pekan lalu.		
9.	Dalam kasus ini, Dada dan Edi diduga bersama-sama menyuap Setyabudi Tejocahyono. KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap. Lembaga antikorupsi itu pun lebih dulu menjerat orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Hery Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto. Kini, KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut yang memungkinkan adanya tersangka baru.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : DPRD MINTA KPK PINJAMKAN DADA

Untuk Hadiri Pelantikan Wali Kota Terpilih (21 Agustus 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa di Verifikasi	Tidak Bisa di Verifikasi
1.	Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan mengaku telah mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemberitahuan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengadakan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota Bandung periode 2013-2018.		
2.	KPK menahan Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuaipan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.		
3.	Walau begitu, para PNS di jajaran Pemkot terlihat prihatin. Ini terlihat dari pembicaraan dan status Blackberry yang hampir semuanya menyampaikan keprihatinan.		
4.	Mahkamah Agung (MA) menyerahkan seluruh proses hukum para hakim yang disebut oleh mantan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi ke KPK. Termasuk juga Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso yang disebut menerima suap dari Dada Rosada.		
5.	Singgih disebut menerima uang suap dari Dada Rosada dan Edi Siswadi melalui Toto Hutagalung yang diserahkan pada terdakwa Setyabudi Tejocahyono. Dalam dakwaan Setyabudi, jaksa menyebut Singgih mendapat jatah US\$ 15 ribu, sementara dua anggota majelis hakim perkara korupsi bansos, yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, mendapat masing-masing US\$ 18.300.		
6.	Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (15/8), terungkap pengakuan Setyabudi kepada penyidik KPK bahwa uang yang diterimanya dari Toto Hutagalung sebesar Rp 1,8 miliar itu sebagian diantaranya diserahkan kepada dua hakim anggota yang menyidangkan kasus bansos, yakni Ramlan Comel dan Djodjo Djohari.		
7.	Baik Ramlan Comel maupun DjoDjo Djohari hingga kemarin enggan menjawab pertanyaan <i>Tribun</i> tentang tuduhan bahwa keduanya telah menerima uang suap dari Toto Hutagalung yang diserahkan oleh Setyabudi.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

SATUAN ANALISIS : PARAGRAF FAKTA DALAM TEKS BERITA

Isu Pemberitaan : PENAHANAN DADA DIPERPANJANG 40 HARI (7 September 2013)

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori VERIFIKASI FAKTA	
		Bisa di Verifikasi	Tidak Bisa di Verifikasi
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Setyabudi Tejocahyono. Dada ditahan untuk 40 hari ke depan terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.		

2.	Menurut jadwal pemeriksaan KPK, Dada kemarin diperiksa sebagai tersangka. Mengenakan rompi tahanan, Dada masuk ke gedung pukul 10.33. sekitar setengah jam kemudian, ia keluar.		
3.	Dada resmi ditahan di Rutan Cipinang pada 19 Agustus lalu. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung bersama mantan sekretaris daerah Bandung, Edi Siswadi. KPK menjerat mereka dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.		
4.	Kemarin, KPK kembali memanggil Dada sebagai tersangka. Selain Dada, penyidik memanggil seorang PNS Pemerintah Kota Bandung, Rochman, yang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas para tersangka kasus tersebut.		
5.	Abidin pun menyampaikan pesan Dada yang mempertanyakan berita tentang pernyataan Dada yang akan buka-bukaan masalah dana bantuan sosial, khususnya aliran dana bansos ke dewan.		
Total Amount of			
Total Percentase of			

2) **DIMENSI AKURASI, KATEGORI EYE WITNESS COMPARISONS**

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No.	Item Analisis	Konstruksi Kategori EYE WITNESS COMPARISONS		
		Tidak ada saksi	Ada Saksi	
			Saksi Diungkapkan Jati Dirinya	Saksi Tidak Diungkapkan Jati Dirinya
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)			
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)			
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)			
Total Amount Of				
Total Percentase Of				

D. COMPLETENESS

1) DIMENSI COMPLETENESS, KATEGORI KELENGKAPAN 5W+1H

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No.	Item Analisis	Konstruksi Kategori KELENGKAPAN UNSUR BERITA	
		Berita Lengkap Mengandung Unsur 5W + 1H	Berita Tidak Lengkap Mengandung Unsur 5W + 1H
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)		
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)		
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)		
Total Amount Of			
Total Percentase Of			

2) DIMENSI COMPLETENESS, DIMENSI REFERENCE

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori REFERENCE	
		Ada Reference	Tidak Ada Reference
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)		
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)		
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)		
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)		
Total Amount of			
Total Percentase of			

E. RELEVANCE

1) DIMENSI RELEVANCE, KATEGORI *RELAVITE SALIENCE*

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No.	Item Analisis	Konstruksi Kategori RELATIVE SALIENCE	
		Relevan	Tidak Relevan
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)		
3.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)		
4.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)		
6.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)		
Total Amount Of			
Total Percentase Of			

2) DIMENSI RELEVANCE, KATEGORI *RELATIVE PRIORITY*

SATUAN ANALISIS : BERITA

Isu Pemberitaan : Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada

Dimuat di : Tribun Jabar

No	Item Analisis	Konstruksi Kategori RELATIVE PRIORITY		
		Penting	Kurang Penting	Tidak Penting
1.	Edi Siswandi Tersangka Suap (2 Juli 2013)			
2.	Akhirnya Pakai Rompi Orange (20 Agustus 2013)			
3.	DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada (21 Agustus 2013)			
4.	Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari (7 September 2013)			
Total Amount of				
Total Percentase of				

Draf Wawancara Surat Kabar Pikiran Rakyat

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Pikiran Rakyat ?
2. Apa visi dan misi Pikiran Rakyat ?
3. Menurut anda apa yang dimaksud objektivitas ?
4. Bagaimana anda memandang objektivitas dalam berita korupsi ?
5. Seberapa penting objektivitas dalam berita korupsi ?
6. Bagaimanakah proses Pikiran Rakyat meliput berita korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada ?
7. Jika seandainya reporter yang terjun ke lapangan mengutip dari situs lain, apa pertimbangan dari reporter dan editor agar informasi yang dikutip tetap memenuhi unsur objektivitas?
8. Bagaimana proses pengolahan berita di Pikiran Rakyat ?
9. Bagaimana proses editing di Pikiran Rakyat ?
10. Apakah ada standar-standar editing tertentu di Pikiran Rakyat ?
11. Hal apakah yang menjadi keunikan tersendiri dari pemberitaan korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, bila dibandingkan dengan surat kabar lainnya ?
12. Kebijakan apa saja, berita yang bisa dimuat dalam Pikiran Rakyat ?
13. Bagaimana anda menyikapi objektivitas, jika seandainya isu dalam berita berbenturan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan ?

Draf Wawancara Surat Kabar Tribun Jabar

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Tribun Jabar ?
2. Apa visi dan misi Tribun Jabar ?
3. Menurut anda apa yang dimaksud objektivitas ?
4. Bagaimana anda memandang objektivitas dalam berita korupsi ?
5. Sebarapa penting objektivitas dalam berita korupsi ?
6. Bagaimanakah proses Tribun Jabar meliput berita korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada ?
7. Jika seandainya reporter yang terjun ke lapangan mengutip dari situs lain, apa pertimbangan dari reporter dan editor agar informasi yang dikutip tetap memenuhi unsur objektivitas?
8. Bagaimana proses pengolahan berita di Tribun Jabar ?
9. Bagaimana proses editing di Tribun Jabar ?
10. Apakah ada standar-standar editing tertentu di Tribun Jabar ?
11. Hal apakah yang menjadi keunikan tersendiri dari pemberitaan korupsi mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, bila dibandingkan dengan surat kabar lainnya ?
12. Kebijakan apa saja, berita yang bisa dimuat dalam Tribun Jabar ?
13. Bagaimana anda menyikapi objektivitas, jika seandainya isu dalam berita berbenturan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan ?

CODING BOOK

NO	KOLOM	VARIABEL	KETERANGAN
1.	1-2	Kode Pengkoding	01 : Dieni 02 : N.S Junaedi 03 : Adil Nursalam
2.	3-5	Jumlah Sampel Penelitian	3 : Paragraf 4 : Paragraf Fakta 5 : Berita
3.	6-9	Kategori Faktualitas	6 : Fakta 7 : Opini 8 : Fakta + Opini 9 : Netral
4.	10-11	Kategori Kemampuan Untuk Dicek Kembali (<i>Checkability</i>)	10 : Bisa Diverifikasi 11 : Tidak Bisa Diverifikasi
5.	12-14	Kategori Kekayaan Informasi (<i>Readability</i>)	12 : Berguna 13 : Kurang Berguna 14 : Tidak Berguna
6.	15-16	Kategori Kepadatan Isi Berita (<i>Density</i>)	15 : Padat 16 : Tidak Padat
7.	17-19	Kategori Sudut Pandang yang Ditampilkan (<i>Breadth</i>)	17 : Satu Sudut Pandang 18 : Dua Sudut Pandang 19 : Lebih dari Dua Sudut Pandang
8.	20-22	Kategori Kedalaman Isi Berita (<i>Depth</i>)	20 : Mendalam 21 : Kurang Mendalam 22 : Tidak Mendalam
9.	23-24	Kategori Verifikasi Fakta	23 : Bisa Diverifikasi

			24 : Tidak Bisa Diverifikasi
10.	25-27	Kategori Keberadaan Saksi Mata (<i>Eye Witness Comparisons</i>)	25 : Tidak Ada Saksi 26 : Saksi Diungkap Jati Dirinya 27 : Saksi Tidak Diungkap Jati Dirinya
11.	28-29	Kategori Kelengkapan Unsur Berita	28 : Lengkap Mengandung 5W+1H 29 : Tidak Lengkap Mengandung 5W+1H
12.	30-31	Kategori <i>Reference</i>	30 : Ada <i>Reference</i> 31 : Tidak Ada <i>Reference</i>
13.	32-33	Kategori <i>Relative Salience</i>	32 : Relevan 33 : Tidak Relevan
14.	34-36	Kategori Penempatan Berita (<i>Relative Priority</i>)	34 : Penting 35 : Kurang Penting 36 : Tidak Penting

COODING SHEET SURAT KABAR PIKIRAN RAKYAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	83	33	4	52	16	15	0	79	4	4	0	0	3	1	0	1
0	2	83	33	4	42	28	13	0	78	5	4	0	0	4	0	0	2
0	3	83	33	4	35	26	20	2	74	9	4	0	0	4	0	0	2

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	3	1	0	29	4	0	3	1	4	0	4	0	4	0	4	0	0
2	4	0	0	33	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	1	0
2	4	0	0	30	3	0	3	1	4	0	4	0	4	0	4	0	0

COODING SHEET SURAT KABAR TRIBUN JABAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1	60	30	4	40	14	6	0	58	2	4	0	0	3	1	0	2
0	2	60	30	4	30	18	8	4	60	0	2	2	0	4	0	0	2
0	3	60	30	4	25	19	14	2	58	2	4	0	0	4	1	0	2

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	3	1	0	29	1	0	3	1	4	0	4	0	4	0	4	0	0
2	4	0	0	30	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0
2	4	0	0	27	3	0	4	1	4	0	3	1	4	0	3	1	0

PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS

FAKTUALITAS VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Kategori	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Fakta	58	42	35	135
Opini	15	28	26	69
Campuran Fakta dan Opini	10	13	20	43
Bukan Fakta dan Bukan Opini	0	0	2	2
Total	83	83	83	n = 249

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
58	45,00	13,00	169,00	3,76
42	45,00	-3,00	9,00	0,20
35	45,00	-10,00	100,00	2,22
15	23,00	-8,00	64,00	2,78
28	23,00	5,00	25,00	1,09
26	23,00	3,00	9,00	0,39
10	14,33	-4,33	18,78	1,31
13	14,33	-1,33	1,78	0,12
20	14,33	5,67	32,11	2,24
Jumlah				$\chi^2 = 14,11$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{14,11}{249 + 14,11} = \frac{14,11}{263,11} = 0,053$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,053) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,947) \cdot 100\%$$

$$IRC = 94,7 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Kategori	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Fakta	40	30	25	95
Opini	14	18	19	51
Campuran Fakta dan Opini	6	8	14	28
Bukan Fakta dan Bukan Opini	0	4	2	6
Total	60	60	60	n = 180

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
40	31,66	8,34	69,55	2,2
30	31,66	-1,66	2,76	0,09
25	31,66	-6,66	44,35	1,40
14	17	-3	9	0,53
18	17	1	1	0,06
19	17	2	4	0,24
6	9,33	-3,33	11,08	1,19
8	9,33	-1,33	1,77	0,19
14	9,33	4,67	21,80	2,34
Jumlah				$\chi^2 = 8,22$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{8,22}{180 + 8,22} = \frac{8,22}{188,22} = 0,043$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,043) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,957) \cdot 100\%$$

$$IRC = 95,7 \%$$

CHECKABILITY VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Checkability	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Bisa Diverifikasi	79	78	74	231
Tidak Bisa Diverifikasi	4	5	9	18
Total	83	83	83	n = 249

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
79	77	2	4	0,05
78	77	1	1	0,01
74	77	-3	9	0,12
4	6	-2	4	0,67
5	6	-1	1	0,17
9	6	3	9	1,50
Jumlah				$\chi^2 = 2,52$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{2,52}{249 + 2,52}$$

$$C = \frac{2,52}{251,52}$$

$$C = 0,010$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,010) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,99) \cdot 100\%$$

$$IRC = 99 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Checkability	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Bisa Diverifikasi	58	60	58	176
Tidak Bisa Diverifikasi	2	0	2	4
Total	60	60	60	n = 180

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
58	58,66	-0,66	0,44	0,01
60	58,66	1,34	1,80	0,03
58	58,66	-0,66	0,44	0,01
2	1,33	0,67	0,45	0,34
0	1,33	-1,33	1,77	1,33
2	1,33	0,67	0,45	0,34
Jumlah				$\chi^2 = 2,05$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{2,05}{180 + 2,05}$$

$$C = \frac{2,05}{182,05}$$

$$C = 0,0112$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,0112) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,98) \cdot 100\%$$

$$IRC = 98 \%$$

READABILITY VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Readability	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Informasi Berguna	4	4	4	12
Informasi Kurang Berguna	0	0	0	0
Informasi Tidak Berguna	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$IRC = (1) \cdot 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Readability	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Informasi Berguna	4	2	4	10
Informasi Kurang Berguna	0	2	0	2
Informasi Tidak Berguna	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
4	3,34	0,66	0,44	0,13
2	3,34	-1,34	1,80	0,54
4	3,34	0,66	0,44	0,13
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
2	0,67	1,33	1,77	2,64
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 4,78$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,284) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{4,78}{12 + 4,78}$$

$$IRC = (0,716) \cdot 100\%$$

$$IRC = 71,6 \%$$

$$C = \frac{4,78}{16,78}$$

$$C = 0,284$$

DENSITY VALUE

Surat Kabar Pikiran rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Density	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Padat	3	4	4	11
Tidak Padat	1	0	0	1
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
3	3,67	-0,67	0,45	0,12
4	3,67	0,33	0,11	0,03
4	3,67	0,33	0,11	0,03
1	0,34	0,66	0,44	1,28
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
Jumlah				$\chi^2 = 2,14$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{2,14}{12 + 2,14}$$

$$C = \frac{2,14}{14,14}$$

$$C = 0,151$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,151) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,849) \cdot 100\%$$

$$IRC = 84,9 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Density	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Padat	3	4	3	10
Tidak Padat	1	0	1	2
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
3	3,34	-0,34	0,12	0,03
4	3,34	0,66	0,44	0,13
3	3,34	-0,34	0,12	0,03
1	0,67	0,33	0,11	0,16
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
1	0,67	0,33	0,11	0,16
Jumlah				$\chi^2 = 1,19$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{1,19}{12 + 1,19}$$

$$C = \frac{1,19}{13,19}$$

$$C = 0,092$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,092) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,908) \cdot 100\%$$

$$IRC = 90,8 \%$$

BREADTH VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Breadth	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Satu Sudut Pandang	0	0	0	0
Dua Sudut Pandang	1	2	2	5
Lebih dari Dua Sudut Pandang	3	2	2	7
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1	1,67	-0,67	0,45	0,27
2	1,67	0,33	0,11	0,07
2	1,67	0,33	0,11	0,07
3	2,34	0,66	0,44	0,19
2	2,34	-0,34	0,12	0,05
2	2,34	-0,34	0,12	0,05
Jumlah				$\chi^2 = 0,68$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,053) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{0,68}{12 + 0,68}$$

$$IRC = (0,947) \cdot 100\%$$

$$IRC = 94,7 \%$$

$$C = \frac{0,68}{12,68}$$

$$C = 0,053$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Breadth	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Satu Sudut Pandang	0	0	0	0
Dua Sudut Pandang	2	2	2	6
Lebih dari Dua Sudut Pandang	2	2	2	6
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	2	0	0	0
2	2	0	0	0
2	2	0	0	0
2	2	0	0	0
2	2	0	0	0
2	2	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$IRC = (1) \cdot 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

DEPTH VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Depth	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Mendalam	3	4	4	11
Kurang Mendalam	1	0	0	1
Tidak Mendalam	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
3	3,67	-0,67	0,45	0,12
4	3,67	0,33	0,11	0,03
4	3,67	0,33	0,11	0,03
1	0,34	0,66	0,44	1,28
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 2,14$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,151) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{2,14}{12 + 2,14}$$

$$IRC = (0,849) \cdot 100\%$$

$$IRC = 84,9 \%$$

$$C = \frac{2,14}{14,14}$$

$$C = 0,151$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Depth	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Mendalam	3	4	4	11
Kurang Mendalam	1	0	0	1
Tidak Mendalam	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
3	3,67	-0,67	0,45	0,12
4	3,67	0,33	0,11	0,03
4	3,67	0,33	0,11	0,03
1	0,34	0,66	0,44	1,28
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 2,14$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,151) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{2,14}{12 + 2,14}$$

$$IRC = (0,849) \cdot 100\%$$

$$IRC = 84,9 \%$$

$$C = \frac{2,14}{14,14}$$

$$C = 0,151$$

VERIFIKASI FAKTA VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Verifikasi Fakta	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Bisa Diverifikasi	32	33	30	95
Tidak Bisa Diverifikasi	1	0	3	4
Total	33	33	33	n = 99

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
32	30,7	1,3	1,69	0,05
33	30,7	2,30	5,29	0,17
30	30,7	-0,70	0,49	0,02
1	2,34	-1,34	1,8	0,76
0	2,34	-2,34	5,48	2,34
3	2,34	0,66	0,44	0,19
Jumlah				$\chi^2 = 3,53$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$C = \frac{3,53}{99 + 3,53}$$

$$IRC = (1 - 0,034) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,97) \cdot 100\%$$

$$IRC = 97 \%$$

$$C = \frac{3,53}{102,53}$$

$$C = 0,034$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Verifikasi Fakta	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Bisa Diverifikasi	29	30	27	86
Tidak Bisa Diverifikasi	1	0	3	4
Total	30	30	30	n = 90

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
29	28,7	0,30	0,09	0,003
30	28,7	1,30	1,69	0,06
27	28,7	-1,70	2,89	0,10
1	1,4	-0,40	0,16	0,11
0	1,4	-1,40	1,96	1,40
3	1,4	1,60	2,56	1,83
Jumlah				$\chi^2 = 3,51$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{3,51}{90 + 3,51}$$

$$C = \frac{3,51}{93,51}$$

$$C = 0,04$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,04) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,96) \cdot 100\%$$

$$IRC = 96 \%$$

EYE WITNESS COMPARISONS VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Eye Witness Comparisons	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Tidak Saksi	0	0	0	0
Saksi Diungkap Jati Dirinya	4	4	3	11
Saksi Tidak Diungkap Jati Dirinya	0	0	1	1
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4	3,34	0,66	0,44	0,13
4	3,34	0,66	0,44	0,13
3	3,34	-0,34	0,12	0,03
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
1	0,67	0,33	0,11	0,16
Jumlah				$\chi^2 = 1,79$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{1,79}{12 + 1,79}$$

$$C = \frac{1,79}{13,79}$$

$$C = 0,13$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,13) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,87) \cdot 100\%$$

$$IRC = 87 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Eye Witness Comparisons	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Tidak Saksi	0	0	0	0
Saksi Diungkap Jati Dirinya	4	4	3	11
Saksi Tidak Diungkap Jati Dirinya	0	0	1	1
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4	3,34	0,66	0,44	0,13
4	3,34	0,66	0,44	0,13
3	3,34	-0,34	0,12	0,03
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
0	0,67	-0,67	0,45	0,67
1	0,67	0,33	0,11	0,16
Jumlah				$\chi^2 = 1,79$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,13) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{1,79}{12 + 1,79}$$

$$IRC = (0,87) \cdot 100\%$$

$$IRC = 87 \%$$

$$C = \frac{1,79}{13,79}$$

$$C = 0,13$$

KELENGKAPAN 5W+1H VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Kelengkapan 5W+1H	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Berita Lengkap	4	4	4	12
Berita Tidak Lengkap	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0) \cdot 100\%$$

$$IRC = (1) \cdot 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Kelengkapan 5W+1H	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Berita Lengkap	4	4	4	12
Berita Tidak Lengkap	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

$$IRC = (1 - C). 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0). 100\%$$

$$IRC = (1). 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

REFERENCE VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Reference	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Ada Reference	4	4	4	12
Tidak Ada Reference	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0) \cdot 100\%$$

$$IRC = (1) \cdot 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Reference	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Ada Reference	4	4	3	11
Tidak Ada Reference	0	0	1	1
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
4	3,67	0,33	0,11	0,03
4	3,67	0,33	0,11	0,03
3	3,67	-0,67	0,45	0,12
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
1	0,34	0,66	0,44	1,28
Jumlah				$\chi^2 = 2,14$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$C = \frac{2,14}{12 + 2,14}$$

$$IRC = (1 - 0,151) \cdot 100\%$$

$$IRC = (0,849) \cdot 100\%$$

$$IRC = 84,9 \%$$

$$C = \frac{2,14}{14,14}$$

$$C = 0,151$$

RELATIVE SALIENCE VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Relative Saliencie	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Relevan	4	4	4	12
Tidak Relevan	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0) \cdot 100\%$$

$$IRC = (1) \cdot 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Relative Salience	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Relevan	4	4	4	12
Tidak Relevan	0	0	0	0
Total	4	4	4	n = 12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O - E)^2}{E}$
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
4	4	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 0$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{0}{12 + 0}$$

$$IRC = (1) \cdot 100\%$$

$$IRC = 100 \%$$

$$C = \frac{0}{12}$$

$$C = 0$$

RELATIVE PRIORITY VALUE

Surat Kabar Pikiran Rakyat

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Relative Priority	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Penting	4	3	4	11
Kurang Penting	0	1	0	1
Tidak Penting	0	0	0	0
Total	4	4	4	12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
4	3,67	0,33	0,11	0,03
3	3,67	-0,67	0,45	0,12
4	3,67	0,33	0,11	0,03
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
1	0,34	0,66	0,44	1,28
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 2,14$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,151) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{2,14}{12 + 2,14}$$

$$IRC = (0,849) \cdot 100\%$$

$$IRC = 84,9 \%$$

$$C = \frac{2,14}{14,14}$$

$$C = 0,151$$

Tabel Kesepakatan Antar Pengkoding

Konstruksi Kategori Relative Priority	Coder			Total
	Dieni	N.S Junaedi	Adil Nursalam	
Penting	4	4	3	11
Kurang Penting	0	0	1	1
Tidak Penting	0	0	0	0
Total	4	4	4	12

Tabel Penghitungan Chi-Kuadrat

O	E	(O-E)	(O-E) ²	$\frac{(O-E)^2}{E}$
4	3,67	0,33	0,11	0,03
4	3,67	0,33	0,11	0,03
3	3,67	-0,67	0,45	0,12
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
0	0,34	-0,34	0,12	0,34
1	0,34	0,66	0,44	1,28
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Jumlah				$\chi^2 = 2,14$

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$IRC = (1 - C) \cdot 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,151) \cdot 100\%$$

$$C = \frac{2,14}{12 + 2,14}$$

$$IRC = (0,849) \cdot 100\%$$

$$IRC = 84,9 \%$$

$$C = \frac{2,14}{14,14}$$

$$C = 0,151$$



UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Jalan Tamansari no.1 Bandung 40116 - Telp & Fax: (022) 4264070 | Hunting: (022) 4203368 ext. 140,141,142.

<http://fkom.unisba.ac.id> ; email: fkomunisba@yahoo.co.id



Nomor : 087/AK-E/III/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Pra Riset/Riset.

15 Jumadil Awal 1435 H
17 Maret 2014 M

Kepada Yth,
Pikiran Rakyat
Jl. Soekarno Hatta No. 147 Bandung 40223

*Bismillaahirrahmaanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sehubungan dengan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.

Nama : Dieni Nurdianingsih
NPM : 10080010266
Bidang Kajian : Jurnalistik

Kami mohon diberi ijin untuk melakukan Riset/Pra Riset guna mendapatkan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul Skripsi dimaksud adalah:

Analisis Berita Korupsi dalam Perspektif Media Lokal (Teknik Analisis Isi Mengenai Perbandingan Berita Korupsi Mantan Wali Kota Bandung di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari Objektivitas)

Demikian permohonan ini, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui :
Wakil Dekan I,



Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si.

Nomor : 092/AK-E/III/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Pra Riset/Riset.

18 Jumadil Awal 1435 H
20 Maret 2014 M

Kepada Yth:
Tribun Jabar
Jl. Sekelimus Utara 2-4 Soekarno Hatta Bandung

Bismillaahirrahmaanirrafiim.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung,

Nama : Dieni Nurdianingsih
NPM : 10080070266
Bidang Kajian : Jurnalistik
No. HP : 08987017793
e-mail : Dieninurdianingsih@gmail.com.

Kami mohon diberi ijin untuk melakukan Riset/Pra Riset guna mendapatkan data di Lembaga/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul Skripsi dimaksud adalah:

Analisis Berita Korupsi dalam Perspektif Media Lokal (Teknis Analisis Isi Mengenai Perbandingan Berita Korupsi Mantan Wali Kota Bandung di Harian Umum Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar Ditinjau dari Objektivitas)

dengan dosen pembimbing Ferry Darmawan, S.Sos., M.Ds. (No. HP.082117744911). Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut berkenaan dengan topik maupun pengerjaan skripsi ini, dapat menghubungi dosen pembimbing pada nomor HP yang telah disebutkan dalam surat ini.

Demikian permohonan ini. Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui :
Wakil Dekan I,



Santi Indra Astuti
Santi Indra Astuti, S.Sos., M.Si.

independen
dan
tepercaya

Pikiran Rakyat

DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT

KANTOR PUSAT : J. Asia Afrika No. 77 Bandung 40131
Telp. (022) 420934 (Hunting), (022) 4205210-4204330 P.O. Box. 1254, Fax. (022) 4130612
REDAKSI : J. Soekarno - Hatta No. 147 Telp. (022) 4927798 (Hunting)
PERWAKILAN JAKARTA : J. Gajah Mada No. 101 Jakarta 11340
Telp. (021) 491288 (Hunting), 4339101, Fax. (021) 4332821
PERWAKILAN YOGYAKARTA : J. Barmasari No. 36 Yogyakarta 55211
Telp. 0274-544659 - 0274-575487
WEBSITE : www.pikiran-rakyat.com



Bandung, 1 April 2014

Nomor : B.IV/40/IV/Red/2014
Perihal : Pemberitahuan Riset

Kepada Yth.
Ketua Bidang Kajian Ilmu Jurnalistik
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Bandung
di
Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami beri tahukan bahwa mahasiswa Bidang Kajian Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung berikut ini:

Nama : Dieni Nurdianingsih
NPM : 10080010266

telah melaksanakan riset di Harian Umum *Pikiran Rakyat* pada 13 Maret 2014 berkaitan dengan penulisan skripsi berjudul "Analisis Berita Korupsi Dalam Wacana Media Lokal (Studi Komparatif dengan Teknik Analisa Isi Mengenai Berita Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di HU *Pikiran Rakyat* dan *Tribun Jabar* Ditinjau dari Objektivitas".

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Islam Nur Pempasa
Pemimpin Redaksi

SURAT KETERANGAN

005/HRGA-Ref.BMG/V/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : DIENI NURDIANINGSIH
Program/Jurusan : Fakultas Ilmu Komunikasi / Jurnalistik
NIM : 10080010266
Universitas : Universitas Islam Bandung

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di PT Bandung Media Grafika (Harian Pagi Tribun Jabar), sebagai data penunjang Skripsi dengan judul: "Analisis Berita Korupsi dalam Perspektif Media Lokal" (Teknik Analisis Isi Mengenai Perbandingan Berita Korupsi Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada di Surat Kabar Pikiran Rakyat dan Tribun Jabar ditinjau dari Objektivitas).

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Bandung Media Grafika (Harian Pagi Tribun Jabar) sebagai tempat Penelitian/Job Training/ Praktek Kerja Lapangan.

Demikian Surat Referensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 05 Mei 2014



Bernadeta Tri Cahya Dewi
HR & GA Manager

HRGA-Ref.BMG/003/2014

Wali Kota Bandung: Saya tidak Menghilang

Dada dan Edi Jadi Tersangka

JAKARTA, (PR).

Wali Kota Bandung Dada Rosada disangka sebagai otak korupsi suap terhadap Setyabudhi Tedo Cahjono, hakim yang menangani perkara penyelewengan dana bantuan sosial Kota Bandung. Tetapi Dada tak sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Dada dan Edi sebagai tersangka. "Penyidik menyimpulkan DK selaku wali kota Bandung diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Tipikor pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Johan, Senin (1/7/2013).

Pasal yang sama juga disangkakan kepada Edi. Dada dan Edi disangka telah menyuap Setyabudhi untuk memengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bantuan.

Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Tindakan korupsi menyebut, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi pe-

nyataan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.

"Penetapan tersangka ini sejak 1 Juli 2013," kata Johan. Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengaku sudah menerbitkan surat perintah penyidikan pada Jumat (28/6/2013) malam. Menurut Johan, sebelum sprindik diterbitkan, harus dibuat draft sprindik yang disidatangani oleh semua pimpinan KPK. Setelah ketua dan empat wakil ketua KPK menandatangani, barulah sprindik diterbitkan pada 1 Juli 2013.

Sampai saat ini KPK masih menghitung berapa jumlah uang yang diserahkan untuk menyuap Setyabudhi. "Masih ditelusuri," ujar Johan. KPK tidak hanya melihat suap yang diserahkan itu sebatas uang yang diterima Setyabudhi dari Asep Triana pada saat ditangkap tangan, yaitu sebesar Rp 150 juta dan Rp 350 juta yang ditemukan di mobil Asep.

Pengacara Dada, Abidin, mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berjalan di KPK. "Kita ikuti saja," ujar Abidin kepada "PR".

Saat ditanya kesiapan Dada membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusapan ini, Abidin mengatakan, kliennya tidak tahu-menahu soal penyusapan ini. "Pak Dada kan tidak tahu. Siapa yang menyuap itu merupakan tidak tahu. Faktanya, Pak Jerry (Jerry Nurhasbi) menyetipkan uang ke Toto Hutagaing kemudian diberikan ke

(Bersambung ke hal. 11 hal. 1)



Dada dan Edi

(Sambungan dari hal. 1 kol. 5)

Asep," katanya.

Ditambah Dada dan Edi, jumlah tersangka dalam kasus suap bansos menjadi enam orang. Empat lainnya, Setyabudhi Tedjocahyono, Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung dan anak buahnya Asep Triana.

KPK sudah memanggil Dada sembilan kali dan Edi sedikitnya enam kali sebelum keduanya ditetapkan menjadi tersangka. Dalam pemeriksaan, keduanya saling tuding. Menurut Dada, soal patungan itu jadi urusan Edi yang kala itu menjabat sebagai sekretaris daerah. Menurut Dada, Edi tak selalu melaporkan kegiatannya kepada Dada. Sementara menurut Edi, ada perintah dari Dada untuk mengoordinasikan pengumpulan uang.

Toto pernah mengaku pemberian uang pertama kalinya untuk memenuhi permintaan Setyabudhi diserahkan oleh Edi. Menurut Toto, ia hanya menyampaikan permintaan uang oleh Setyabudhi kepada Pemkot Bandung.

Menurut Johan, KPK tak akan berhenti sampai pada penetapan dua tersangka baru ini. KPK masih terus mengembangkan pemeriksaan kasus ini untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain, terutama dari sisi penerima suap. Masih dalam rangka pengembangan kasus ini, KPK kembali me-

eriksa mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono. "Yang bersangkutan hadir," ujar Johan.

Edi menghilang?

Usai pengumuman KPK, Edi Siswadi tak bisa ditemui saat "PR" menyambangi rumahnya di Jalan Cijawura Girang. Rumahnya tampak sepi. Empat orang terlihat berada di saung di halaman rumah. Sementara dua mobil terparkir.

"Bapak sedang istirahat, tadi bilang ke saya mau tidur," kata Cahyo, seorang yang mengaku pegawai Edi Siswadi. Menurut pemilik kios di depan rumah Edi, sejak pagi Edi tak terlihat keluar dari rumahnya.

Lain Edi, lain Dada Rosada. Dada malah menggelar konferensi pers di rumah dinasinya di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Senin. Konferensi pers digelar dengan tujuan untuk meluruskan pemberitaan di sejumlah media yang menyebutkan bahwa Dada menghilang begitu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya tidak menghilang. Hari Sabtu dan Minggu saya ada di rumah, saya juga jalan-jalan keliling kota, kemudian makan di luar rumah. Karena tidak sedang ada janji dengan siapa pun, saya rasis sama seperti wartawan juga, saya kan bebas pergi ke mana saja. Jadi tidak benar kalau dikatakan saya kabur atau ada niat untuk sembunyi," tutur Dada yang didampingi oleh Kadis-

kominfo Kota Bandung Bulgan Alamin.

"Kalau sedang tidak ada dinas atau janji dengan siapa pun, kan bisa saja keluar dengan keluarga atau pergi sendiri, beda halnya kalau saya sudah ada janji," ujar Dada. Sejak Sabtu (29/7/2013) pekan lalu hingga kemarin, wartawan memang tidak menerima jadwal atau agenda kedinasan rutin orang nomor satu di Kota Bandung itu dari staf Diskominfo maupun protokol. Adapun agenda kedinasan hanya diisi oleh Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda maupun Pelaksana Tugas Sekda Kota Bandung Yossi Irianto.

Mengenai proses hukum selanjutnya, Dada menegaskan kalau dia akan kooperatif. "Proses hukumnya harus diikuti, bahwa nantinya ini terbukti salah siapa, biarlah proses hukum yang berjalan, kita harus hormat, jadi jangan sampai dihambat," kata Dada.

Dia juga mengatakan, tidak akan mangkir dari panggilan KPK tanpa alasan jelas. "Waktu saya dapat surat panggilan dengan format yang tidak sesuai dengan format KPK saja saya hadir, apalagi kalau format yang betul," ucapnya.

Dada mengaku hingga saat ini belum menerima surat resmi perihal penetapannya sebagai tersangka. "Saya kan dari koran tahunya, dari media, jadi ya mengenai bagaimana harus menanggapi saya kira sama dengan orang lain, karena pasti punya perasaan yang sama," tutur Dada. (A-170/A-175/A-201)***

Dada Rosada Berakhir di Cipinang

JAKARTA, (PR).-

Wali Kota Bandung Dada Rosada terancam tak bisa menghadiri pelantikan wali kota Bandung yang baru yang rencananya digelar 16 September mendatang. Soalnya, Dada keburu tersandung kasus hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang untuk pertama kalinya memeriksa Dada sebagai tersangka kasus suap terhadap Setyabudhi Tedjohajono, Senin (19/8/2013), tak membiarkan Dada pulang.

Setelah diperiksa sekitar enam jam, Dada dijebloskan ke Rumah Tahanan Cipinang di Jakarta. Baju putih bergaris yang dikenakan Dada saat datang ke KPK, sudah tertutup rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Meski begitu, Dada masih menebar senyum kepada puluhan wartawan yang menunggunya.

"Nanti saja pada saatnya," kata Dada sesaat sebelum memasuki mobil tahanan KPK, Senin (19/8/2013). Didampingi seorang penyidik dan pengawal tahanan, mobil membawa Dada ke Rutan Cipinang.

Kuasa hukum Dada, Abidin

mengatakan, kliennya sudah siap mental kalau pemeriksaannya harus berakhir dengan penahanan. "Saya sudah ceritakan di KPK sudah ada proses, tersangka ada penahanan 20 hari sampai habis 120 hari. Beliau sudah paham, sudah menyerahkan sepenuhnya," ujar Abidin.

Ia mengatakan, kliennya siap membuat kasus itu terang-benderang. Termasuk mengungkap adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. "Siapa kooperatif seperti itu. Tiga hal yang saya tekankan, agar keterangan itu harus yang dilihat sendiri, dialami sendiri, dan didengar sendiri. Pak Dada akan menyampaikan apa adanya, tidak bermaksud menyalahkan orang lain," tuturnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Dada ditahan di Rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan. Dada diduga telah menyuap Setyabudhi untuk memengaruhi keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menyidangkan perkara penyelewengan dana bantuan sosial

(Bersambung ke hal. 14 kol. 1)

Dada Rosada

(Sambungan dari hal. 1 kol. 4)

Kota Bandung. Dada terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta.

Rp 3 miliar

Kemarin, Abidin menegaskan, Dada tidak pernah memberi uang kepada siapa pun. Dada juga tidak pernah menyetujui pemberian uang terhadap hakim. Namun Dada mengaku ada permintaan uang sebesar Rp 3 miliar untuk hakim. Permintaan itu datang dari Toto Hutagalung yang disampaikan kepada salah seorang kepala dinas. "Awalnya, Toto minta ke satu kadis (kepala dinas). Dijawab, harus izin dulu ke Pak Dada. Awalnya minta Rp 3 miliar. Pak Dada tanya, 'siapa itu yang minta?' (Dijawab) Tanya saja ke X. Saya sebut X saja ya," tutur Abidin.

X yang disebut Abidin adalah hakim yang menurut Toto meminta uang kepadanya. "Itu permintaan dari hakim katanya (Toto)," kata Abidin.

Setelah itu, kata Abidin, Dada tidak pernah lagi berkomunikasi mengenai rencana pemberian uang. Abidin membantah bahwa Dada memerintahkan anak buahnya urunan. "Pak Toto sudah koordinasi dengan di bawah," ujarnya.

Abidin mengatakan, pemberian uang Rp 125 juta kepada Setyabudhi ketika tangkap tangan pada Maret lalu bukanlah pemberian pertama. Setyabudhi sudah berkali-kali menerima uang dari Toto. Namun ia tidak menjelaskan berapa uang yang sudah diserahkan kepada Setyabudhi.

Dada seharusnya diperiksa Jumat (16/8/2013), hari yang sama dengan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi yang berbuntut dengan penahanan Edi di Rutan Salemba. Dada lolos dari penahanan karena ia memilih menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung ketimbang memenuhi pemanggilan KPK.

Ketidakhadiran Dada pada Jumat itu ditanyakan kepada saksi yang diperiksa kemarin.

Sekda Kota Bandung Yosi Irinto kemarin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dada dan Edi. Selain menanyakan tentang keberadaan Dada pada Jumat, penyidik juga menyinggung soal pelantikan Yosi yang dilalukan malam hari. Menurut

Yosi, pelantikan dilakukan setelah ada surat dari Pemprov Jawa Barat agar wali kota Bandung segera melantik sekda kota Bandung.

"Saya jelaskan, memang benar Pak Dada sedang rapat di DPRD. Saya juga ada di sana. Pelantikan itu tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang berjalan di KPK," kata Yosi.

Pemeriksaan terhadap Yosi hanya berlangsung kurang dari dua jam. Materi pemeriksaannya hampir sama dengan materi untuk keempat tersangka sebelumnya.

Selain Yosi, penyidik juga memeriksa tiga kepala dinas di Pemkot Bandung. Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana. Ketiganya sudah pernah diperiksa sebelumnya.

Prihatin

Begitu Dada resmi ditahan KPK, di rumahnya di Jalan Tirtasari II No 12, Kota Bandung, tak tampak kegiatan apa-apa. Sejumlah mobil diparkir di depan rumah serta di garasi. Di dalam garasi, ada tiga mobil. Di antaranya Toyota Innova D 1701. Dua mobil lainnya tertutup terpal. Menjelang pukul 21.00, satu per satu mobil yang terparkir di luar rumah, mulai meninggalkan tempatnya.

Tamu-tamu yang keluar dari rumah Dada Rosada itu enggan berkomentar. Seorang tamu yang keluar rumah Dada, hanya menjawab singkat ketika ditanya wartawan. "Enggak, enggak. Enggak tahu," katanya singkat sambil langsung masuk ke mobilnya.

Beberapa anggota Satpol PP dan protokolер tampak berjaga di pos jaga serta samping rumah Dada. Mereka juga kompak tutup mulut. "Tidak tahu. Saya juga baru datang tadi magrib," kata seorang petugas jaga saat ditanya keberadaan keluarga Dada.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Aji Vivananda prihatin mendengar kabar penahanan Dada. "Prihatin. Berharap KPK bisa menanggukkan penahanan untuk sementara waktu, dengan pertimbangan hukum bahwa Pak Dada selama ini bersikap kooperatif dalam pemeriksaan," ucap Aji.

"Dengan alasan kemanusiaan,

yang bersangkutan telah mengabdikan untuk Kota Bandung," ujarnya.

Lagipula, disambung Aji, hanya tinggal sebulan lagi akan dilakukan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota terpilih. "Tapi kami hormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, meskipun kami akan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah," kata Aji.

Dia menambahkan, Pemkot akan memberikan bantuan hukum yang memadai untuk pendampingan kasus ini.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandhara menilai, penahanan Dada akan memiliki pengaruh emosional terhadap suasana kerja di lingkungan Pemkot Bandung. "Secara mekanisme, Pak Wali sudah menyerahkan laporan akhir masa jabatan, sudah menyerahkan pertanggungjawaban APBD, dan kemarin juga sudah menghadiri rapat paripurna usulan pemberhentian dan pelantikan wali kota baru," tutur Haru.

Meskipun demikian, kata dia, wewenang Dada sebagai wali kota masih *full* hingga 16 September mendatang. "Suasana keprihatinan pasti ada, jadi secara emosional pasti ada pengaruh," ujarnya.

Akan tetapi, dia berharap agar kualitas pelayanan dan suasana pemerintahan di Pemkot Bandung tak terpengaruh. Apalagi, secara aturan masih ada wakil wali kota Bandung dan sekda.

Pelantikan

Sementara itu, penahanan Dada diperkirakan tidak akan mengganggu jadwal pelantikan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018 yang rencananya akan dilangsungkan pada 16 September 2013 mendatang. Pelantikan akan tetap berlangsung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Wastukan-cana, Bandung.

"Kami sangat prihatin mendengar kabar ini (penahanan Dada). Mudah-mudahan saat pelantikan nanti tetap bisa hadir," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandhara, ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Senin sore.

Haru mengatakan, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, kehadiran wali kota yang telah berakhir masa jabatannya tidak memengaruhi sah-tidaknya pelantikan. "Tapi kami harapkan nanti Pak Wali bisa hadir, saya pikir semua juga merasa prihatin dengan kejadian ini," ucapnya. (A-128/A-170/A-173)

Eceran
Rp 2.900,-
Langganan
Rp 65.000,-/bulan
32 Halaman

Pikiran Rakyat



DARI RAKYAT - OLEH RAKYAT - UNTUK RAKYAT

Independen dan Terpercaya

BANDUNG, RABU (PAJING) 21 AGUSTUS 2013

14 SYAWAL 1434 H - SAUWAL 1946 - HALAMAN 1

Edi Sukanto dari Istana Group Ikut Diperiksa

KPK Pertimbangkan Izin Dada

JAKARTA, (PRU)-

Komis Pemberantasan Korupsi masih menimbang petinggi Wala Kota Bandung Dada Rosadi dalam pelantikan dan serah terima jabatan wali kota-wakil wali kota Bandung periode 2013-2018, 16 September mendatang. Kalau betul kehadiran Dada tidak menguntungkan selanjutnya, KPK tidak akan mengizinkan permintaan DPRD Kota Bandung untuk menghadirkan Dada yang saat ini ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

"Akan dipelajari dulu sejarah mana pentingnya kehadiran Dada dalam pelantikan itu. Apakah worth it untuk istana tidak?" kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Johan mengatakan, sampai saat ini KPK belum menerima surat permintaan

dari DPRD Kota Bandung yang meminta Dada diizinkan hadir dalam acara itu. Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan, surat sudah dikirimkan ke KPK pada Senin, 19/8/2013, malam.

Johan menjelaskan, KPK juga belum pernah mengizinkan permintaan untuk mengizinkan seorang tahanan untuk menghadiri acara serah terima jabatan. "Belum ada yang seperti ini. Ada beberapa contoh, misalnya orangtuanya meninggal atau anggota keluarganya meninggal," kata Johan.

Kecuali kasusnya berbeda, ada beberapa kepala daerah yang ditahan, dan melantik pejabat saat terjerat kasus korupsi. Pada 2011, beladina kasus korupsi Yusak Yahwo dilantik oleh Gubernur Papua Bernal Simba sebagai bupati

Beren Diga, Selang Pagarpa hilirnya DPRD Papua untuk melantik Yusak dilakukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Hal itu karena Yusak sedang menjalani hukuman di Rutan Cipinang. Pelantikan itu mendapat pengawasan ketat dari Rutan Cipinang dan aparat penegak hukum lainnya.

Kasus lainnya, Wali Kota Tomohon Jefferson Ramatjar yang berstatus sebagai tahanan melantik kepala dinas di Rutan Cipinang. Itu bisa terjadi lantaran Menteri Dalam Negeri belum membenarkan Jefferson.

Pengusaha diperiksa

5-Lara (20/8/2013) kemarin, petinggi KPK memeriksa sejumlah rakit dalam kasus sump terhadap Setyabudi Toljagaljono untuk terungkap Dada

Rosadi dan Edi Siswadi. Saksi-saksi yang diperiksa ialah Kepala Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Kota Bandung Gusadi Sukma Bhirukan, Asisten II Pemkot Bandung Uliad Fachrian, dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Bandung Erik M Attasari. Ketiganya salah pernah diperiksa untuk erapat terungkap lain.

Salah satu materi yang ditanyakan ialah urusan kepala dinas yang dibaga sebagai sumber sump sump untuk Setyabudi. "Tadi erana ditanya sejak kapan kenal dengan Pak Dada. Bagaimana hubungannya dengan beliau. Tidak ada wawancara," kata Gusadi.

Selain tiga pejabat itu, KPK juga memeriksa Edi Sukanto. "Belum ada

(Dewanbandung ke buk. 13 Juli 13)

KPK Pertimbangkan

(Sambungan dari hal. 1 hal. 1)

ajumen Istana Group," ujar Johan.

Menurut situs web Istana Group, Edi Sukanto ialah salah seorang pendiri kelompok usaha di bidang properti terkemuka di Bandung. Beberapa usaha yang dikelolanya ialah Pasar Baru Trade Center, BEC, IBCC, Pusat Belanja Balaban, TTC Kosambi, dan masih banyak lagi. Johan tidak menjelaskan secara terperinci, mengapa Edi Sukanto menjadi saksi dalam penyidikan kasus ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bandung Wisjanto mengatakan, sump yang digunakan untuk menyump Setyabudi berasal dari tiga sumber. Yaitu,

putungan pejabat di Pemkot Bandung, pinjaman dari pihak ketiga, dan dari sump banas yang berkecukupan.

Tidak terganggu

Sementara itu, suasana kerja dan pelayanan di Pemkot Bandung, Selanjutnya tetap normal. Meskipun terlintar kepehatikan dari beberapa staf dan pegawai negeri di lingkungan Pemkot Bandung, situasi tetap terlihat seperti biasa.

Meskipun demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung Bulgan Alamin mengakui adanya perbedaan suasana psikologis. "Suasana psikologis PNS ya pri-

latin, tapi pelayanan tetap seperti biasa," kata Bulgan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memastikan, layanan publik di Pemkot Bandung tidak akan terganggu menyusul dilakukannya pemindahan terhadap Dada. "Kasus sudah ada walisnya. Pak Aji (Aji Widada), Jark, masih ada. Layanan publik masih berjalan dengan baik, karena yang penting kan layanan publik tidak terganggu. Pak Aji akan jalan," kata Heryawan.

Heryawan pun menegaskan, tidak perlu ada pergantian sementara. Apalagi dalam waktu dekat wali kota dan wakil wali kota Bandung terpilih akan segera dilantik. "Yang pasti, kita saja proses hukum yang ada, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, dari saja itu.

Mengenal pergantian sump kira tidak perlu. Kan ada wakil wali kota, sebentar lagi juga akan dilantik," tegasnya.

Pemindahan Dada juga dipastikan tidak akan memengaruhi rencana pelantikan wali kota Bandung yang baru. "Tidak mungkin mundur (jeda) pelantikannya, karena tanggal 16 (September) merupakan batas akhir masa jabatan periode kepemimpinan Pak Dada dan Pak Aji," kata Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan.

Erwan mengatakan, telah menginformasikan surat kepada KPK Senin malam. "Suratnya berisi permohonan agar Pak Dada bisa hadir saat pelantikan. Sepertinya tidak akan lengkap kalau tidak ada kehadiran beliau (Dada Rosadi)," ucapnya. (A-137/A-170/A-173)***

No. 158 Tahun XLVIII

HARIAN UMUM

Eceran
Rp 2.900,-
Langganan
Rp 65.000,-/bulan
32 Halaman

Pikiran Rakyat

Pikiran Rakyat
Inspirasi Jawa Barat

DARI RAKYAT OLEH RAK RAKYAT

Independen
dan
tepercaya

BANDUNG, SABTU (WAGI) 7 SEPTEMBER 2013

1 ZULKAIJAH 1434 H - HAPIT 1946 - HALAMAN 1

Suap Bansos

Penahanan Dada Diperpanjang

JAKARTA, (PR)-

Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang penahanan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Perpanjangan itu dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang belum rampung. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penahanan Dada diperpanjang 40 hari.

"Kemarin baru ditahan untuk 20 hari, sekarang diperpanjang," kata Johan Budi, Jumat (6/9/2013).

Dada ditahan pada 29 Agustus lalu setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Masa penahannya akan habis pada akhir pekan ini. Untuk keperluan perpanjangan masa penahanan itu, Dada dipanggil ke KPK. Sekitar satu jam Dada bertemu dengan penyidik. "Perpanjangan (penahanan)," kata Dada usai menjalani pemeriksaan.

Ditanya wartawan dengan berbagai pertanyaan, Dada tak banyak ko-

(Dewanbansur ke hal. 8 hal. 4)



WALI Kota Bandung Dada Rosada tersenyum kepada wartawan saat meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Jumat (6/9/2013). KPK memperpanjang penahanan Dada. Perpanjangannya itu dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang belum rampung.

Penahanan Dada

(Sambungan dari hal. 1 kol. 3)

mentar. Dada hanya menanggapi pertanyaan wartawan soal besannya mendekam di Rutan Cipinang. "Enak tidak enak ya," ujarnya sesaat sebelum memasuki mobil tahanan.

Palsu

Sementara itu, KPK memastikannya foto penggalan surat perintah penyidikan untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Bupati Bogor Rachmat Yasin, palsu. KPK tidak pernah menerbitkan sprindik untuk kedua pejabat itu. Pengawas Internal KPK tengah menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas beredarnya surat palsu itu. Lembaga antirasuah itu tengah mempertimbangkan untuk melaporkan pelakunya ke polisi.

"Hari ini (Jumat, 6/9/2013) ada rapat membahas soal itu (foto penggalan sprindik). Saya diperintahkan menjelaskan kepada teman-teman media. Tadi disampaikan, potongan salinan sprindik Jero Wacik adalah palsu," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Jumat (6/9/2013). Demikian pula dengan sprindik yang ditujukan untuk Rachmat Yasin.

KPK dengan yakin menyebut surat itu palsu lantaran sampai saat ini KPK belum pernah menerbitkan sprindik atas nama kedua orang itu. "KPK

belum mengeluarkan sprindik baru untuk kasus SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) dan TPBU (Tempat Pemakaman Bukaan Umum) di Kabupaten Bogor," kata Johan.

Beredarnya surat palsu itu bermula ketika beberapa redaksi media massa dan wartawan menerima surat elektronik dari satgasmaf-ah@um.ac.id. Surat elektronik itu berisi empat lampiran berisi foto dokumen yang mirip dengan redaksional sprindik yang diterbitkan KPK. Dua foto merupakan sprindik untuk Jero Wacik, dua foto lainnya berkaitan dengan Rachmat Yasin.

Di lampiran itu tertulis, KPK melakukan penyidikan terhadap Jero Wacik karena melakukan tindak pidana korupsi menerima suap atau janji berkaitan dengan proyek PT Kernel Oil Fire Ltd. Jero disangka dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surat itu tampak meyakinkan dengan tanda tangan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dilengkapi dengan stempel KPK. Tertulis Agustus 2013 dengan membiarkan tanggapnya kosong. Di sebelah kiri bawah, terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam, "Tunggu Persetujuan

Presiden (RI)".

Surat untuk Rachmat kurang lebih sama. Bedanya, surat untuk Rachmat tak disertai tulisan tangan seperti surat untuk Jero. Dalam surat itu, Rachmat disangka dengan pasal yang sama, penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan izin lokasi pembangunan TPBU di Desa Antajaya, Kecamatan Tarjungsari, Kabupaten Bogor. Tanggal surat itu, 22 Mei 2013, ditulis tangan.

Saat dikonfirmasi tentang hal ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto membantah telah menandatangani sprindik itu. "Hati-hati! Setahu saya belum ada tersangka lain (dalam kasus SKK Migas) selain tiga orang yang sudah ditetapkan KPK," kata Bambang Widjojanto dalam pesan singkatnya.

Menurut Johan, terdapat beberapa kejanggalan pada surat itu. Antara lain, foto yang beredar tidak menunjukkan surat itu secara utuh, sehingga yang terlihat hanya penggalannya saja. Selain itu, ada huruf yang berbeda. Huruf 'di' Jakarta dan 'Agustus' itu berbeda," ujarnya.

Johan mengatakan, beredarnya surat itu merupakan upaya kesengajaan untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Atas kejadian ini, kata Johan, Pengawas Internal KPK telah bergerak untuk mencari tahu orang yang bertanggung jawab. "Pengawas Internal turun untuk mencari tahu siapa yang mengganggu itu," katanya.

Johan menegaskan, KPK tidak akan membentuk Komite Etik untuk menyelesaikan persoalan surat palsu ini. Sebab, KPK memang tidak pernah menerbitkan sprindik itu. Hal itu berbeda dengan bocornya sprindik Aras Urbaningrum. "Kalau sprindik Aras yang bocor itu, KPK memang mengajukinya surat kami yang dibocorkan oleh pihak dalam. Sementara yang ini, kami belum pernah mengeluarkan sprindik atas nama Jero Wacik," tuturnya.

Johan justru menyamakan kasus ini dengan surat panggilan saksi palsu yang pernah dikirimkan kepada Wali Kota Bandung Dada Rosaida. Dada pada 4 April lalu mendatangi KPK karena menerima surat panggilan sebagai saksi dalam kasus tiap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudhi Tedjohadiso yang menemani perkaranya bantuan sosial Kota Bandung. "Waktu itu Pengawas Internal-KPK juga menyelidiki," ujarnya.

Sampai berita ini ditulis, pimpinan KPK masih membahas langkah apa yang akan diambil selanjutnya. "Apakah perlu melapor ke polisi," kata Johan.

Johan mengatakan, sampai saat ini KPK belum berencana memanggil Jero dalam penyidikan suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. "Kalau Sekjen Kementerian ESDM memang ada rencana, tapi belum tahu tanggal berapa," ujarnya. (A-170)***



BERDOA - Wali Kota Bandung Dada Rosada memanjatkan doa sebagai menjalankan solat dzuhur di mushola Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Senin (1/7). Setelah diletakkan menjadi tersangka kasus suap Barsos Pemerintah Kota Bandung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumal (29/6), Dada Rosada tetap menjalankan tugasnya sebagai wali kota dan mengaku tidak kehilangan dari Kota Bandung.

Edi Siswadi Tersangka Suap

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi sebagai tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono. KPK juga menetapkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Diduga, Edi bersama Dada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Setyabudi terkait kepemimpinan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah

Kota Bandung yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung.

"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan kasus pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Bandung, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Disimpulkan, ES (Edi Siswadi) selaku Sekda Bandung sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (1/7).

Menurut Johan, Edi disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 Ayat 1, atau Pasal 13

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara.

Adapun Pasal 6 Ayat 1 yang memuat hukuman paling berat, berbunyi, dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili.

Menurut Johan, penetapan Edi sebagai tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan penyuapan kepada hakim PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono yang menjerat Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Hery Nurhayat, dan pria bernama Asep Triana yang diduga orang suruhan Toto.

Adapun Setyabudi, Toto, Hery, dan Asep sudah

ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu. Sesuai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Toto mengaku dimintai tolong Setyabudi untuk meminta uang kepada Pemkot Bandung. Menurut Toto, setelah meminta uang kepada Pemkot, dia pun menerima uang dari Sekda Bandung.

Edi Siswadi yang juga mencalonkan diri sebagai calon wali kota Bandung itu, belum bisa dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap. Hubungan telepon maupun pesan singkat (SMS)

yang dikirimkan Tribun beberapa kali, tidak dibalas Edi.

Hingga kemarin keberadaan Edi Siswadi masih belum jelas. Saat ditelusuri ke rumah pribadinya di Jalan Cijawura Girang II Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, wartawan hanya bertemu seorang penjaga rumah yang mengaku bernama Epan.

Menurut lelaki paruh baya ini, sang majikan sudah pergi meninggalkan rumah sejak siang sekitar pukul 11.00 WIB. Di dalam rumah pun tidak ada istri, anak, atau

keluarganya. "Saya datang siang, di rumah sudah tidak ada siapa-siapa. Katanya sudah pergi sejak tadi siang," kata Epan seraya mengaku tidak mengetahui kalau Edi sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penetapan Edi dan Dada sebagai tersangka, Wali Kota Bandung itu enggan berkomentar. "Saya tidak mau komentar soal itu ya," kata Dada saat ditemui di Pendopo, Bandung, Senin. Dia pun enggan komentar banyak soal kasus yang melilitnya oleh lembaga antirasuah tersebut. (tsn/tribunnews)

Sejumlah Remaja Putri Teperdaya

BANDUNG, TRIBUN - Sejumlah gadis remaja, seorang di antaranya berstatus mahasiswa, melapor ke polisi. Mereka mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Ua di rumah kontrakan di dua tempat berbeda yakni di Jalan H Kurdi II, dan Jalan Dengki.

Modus Ua adalah dengan berpura-pura menjadi paranormal yang mampu

memenuhi semua keinginan para korban.

"Macam-macam yang datang nih. Ada yang ingin ujiannya lulus, ingin punya pacar, dan lain-lain," ujar AS saat dimintai keterangan di Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Bandung, Senin (1/7).

Aksi tersebut, sebutnya, ia lakukan sejak 2011.

Tujuh remaja putri yang

melapor adalah GS, IR, IN, WI, DN, NE, Kasat Reskrim Polresta Bandung, AKBP Trunoyudo Wisnu Ajidiko didampingi Karit PPA Polresta Bandung, AKP Ning, mengatakan tersangka dijerat pasal 81, 82, UU RI No 23 Tahun 2002 dan atau Pasal 285 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun. Tersangka, kemarin, sudah ditahan di ruang tahanan Mapolrestabes Bandung. (td)



Novi Amelia

Novi Amelia Ngamuk dan Nyaris Telanjang

JAKARTA, TRIBUN - Model seksi Novie Amelia alias Novi Amalia (26) berubah lagi. Model majalah dewasa tersebut tiba-tiba mengamuk saat menumpang ojek. Ia membuang tas besarnya isinya, kemudian berusaha menanggalkan pakaiannya sehingga nyaris telanjang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (1/7) pagi.

Untungnya aksi nekat Novi diketahui seorang tukang ojek, kemudian mencoba menghentikan Novi dengan segera membawanya ke Polsek Mampang. Dari Polsek Mampang, Novi dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan, selanjutnya dijemput penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Novi diduga kambuh akibat kecanduan narkoba.

"Saat itu Novi bertingkah sangat aneh saat melintas di daerah Mampang. Lalu ada tukang ojek yang melihat dan mengamankan Novi ke Polsek Mampang. Dan dari Polsek dibawa ke Polres," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Timin Sugyo. "Kronologinya seperti apa masih belum tahu. Masih simpang siur. Saat ini, Novi diamankan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan," kata Timin, kemarin siang. Berdasarkan pantauan TRIBUNnews.com, saat diamankan polisi, Novi terlihat meronta-ronta. Dia berupaya melucuti semua pakailah. Novi berada dalam dampungan polisi wanita.

"Novi keadaannya baik-baik saja. Dia memang sempat berteriak dan meronta. Tapi sekarang dalam keadaan baik," ucap Kasat Narkotika Polres Jaksel, Kompol Kus Subiantoro di Polres Jaksel.

Subiantoro membenarkan Novi diserahkan seorang tukang ojek. Subiantoro mengungkapkan keterangan lainnya mengenai awal aksi Novi. "Jadi awalnya yang bersangkutan berteriak-teriak saat diantar oleh ojek. Saat itu Novi meminta diantar ke rumah temannya. Di jalan dia membuang barang-barang, termasuk tasnya," kata Subiantoro.

Lalu oleh si tukang ojek, Novi dibawa ke Polsek Mampang. Setelah itu barulah diserahkan ke Polres Jaksel. Kemudian Novi sempat dirawat karena lengannya

mengalami luka, dan terlihat bercak darah, ketika membuang barang dari dalam tasnya.

Setelah mulai tenang, Novi dibawa ke RS Polri untuk menjalani tes urine dan pemeriksaan kejiwaan, pascatemukan gejala aneh pada dirinya. Selanjutnya, dirujuk ke BNN guna menjalani rehabilitasi. Hal ini dibenarkan Kabag Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwiyanto. "Saat ini Novi ada di RSKO di daerah Cibubur. Setelah dicek tim medis, diputuskan Novi dirawat di RSKO Cibubur," kata Sumirat seraya mengaku belum mengetahui pasti bagaimana kondisi detail Novi.

Direktur Utama RSKO Cibubur, Laurentius Panggabean mengaku belum mendengar kabar mengenai model seksi tersebut menjalani perawatan di RSKO. "Apa benar Novi yang dimaksud itu (Novi Amalia) saya belum tahu. Besok mungkin saya bisa kabarkan," kata Laurentius.

Kuasa hukum Novi Amalia, Rendy Anggara Putra mengaku kaget atas ulah kliennya, yang tanpa alasan jelas tiba-tiba mengamuk dan hendak buka baju di orang banyak. Akibat ulahnya itu, sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terancam terganggu.

"Saya belum tahu kejadiannya, kalau sampai Novi ditahan di Polres (Polres Metro Jakarta Selatan), terpaksa saya minta penangguhan," kata Rendy saat ditemui di RS Polri.

Novi pernah menuai sorotan setelah menabrak 7 orang di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, 11 Oktober 2012. Ketika diamankan, Novi dalam keadaan telor dan hanya mengenakan pakaian dalam, bra warna hijau dan celana pendek bermotif bunga-bunga kuning. Sambil menjalani proses penyidikan, ia menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Saat ini statusnya terdakwa atas kasus menabrak tersebut.

Foto setengah telanjang Novi pun bebob beredar di internet, tahun lalu. Dia dipotret dalam keadaan tangan terborgol, dengan beberapa pose, termasuk tertidur lemas di atas sofa di hadapan polisi. Foto itu menyebabkan beberapa anggota polisi dan seorang wartawan diperiksa polisi. (tribunrepository.unisba.ac.id)

Suami Istri Bikin Pabrik Sabu

CIMAHI, TRIBUN - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama tim dari Satnarkoba Polres Cimahi, menggerebek sebuah rumah di kawasan kompleks perumahan Setraduta, Blok K 5 No 16 A, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Minggu (30/6). Penyisiran bahkan dilakukan hingga Senin (1/7) dini hari. Rumah yang berada di kompleks perumahan mewah tersebut diduga digunakan sebagai tempat produksi sabu-sabu.

Kasat Narkotika Polres Cimahi, AKP Indra Sani mengatakan, dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan pasangan suami istri A dan S. Keduanya, kata dia, diduga kuat merupakan pemilik rumah yang juga sekaligus pabrik pembuatan barang haram sabu-sabu.

"Ya rumah ini diduga sebagai tempat produksi sabu-sabu. Dari rumah tersebut, BNN berhasil menemukan peralatan untuk membuat sabu," jelas Indra saat dihubungi Tribun, Minggu (30/6) malam.

Pasangan suami istri ini, kata Indra, diketahui baru me-

tempati rumah mewah tersebut selama dua bulan. Sebelum pindah ke Cimahi, mereka tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga sejak dua bulan itu lah mereka mulai menjadikan rumah mewah itu sebagai pabrik atau tempat produksi sabu.

"Kemungkinan mereka mulai memproduksi sabu sejak pindah dari Medan, dua bulan ini," kata Indra.

Ketika disinggung mengenai modus pasangan suami istri ini yang sengaja memilih rumah mewah di kawasan elit agar tidak terlalu bersinggungan dengan tetangga atau warga lainnya, Indra mengaku belum dapat memastikannya. "Kalau soal dugaan itu, saya belum dapat bicara, takut salah. Nanti BNN saja yang bicara," jelas Indra.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, tersangka A merupakan pemain lama dalam bisnis pembuatan barang haram ini. A diketahui merupakan mantan narapidana atau residivis pada kasus yang sama pada 2005 lalu.

Namun ketika digerebek petugas BNN, tersangka A ini mengaku baru pertama kali

membuat sabu-sabu. Padahal BNN telah mengincar mereka sejak dua bulan lalu. Di rumah itu BNN dan polisi juga berhasil mengamankan barang bukti seperti bahan baku pembuat sabu berupa obat asma, alat isap, alat memasak, alat saring dan sebuah lemari es yang diduga tempat penyimpanan sabu.

Di samping mengamankan dua orang yang diduga otak sekaligus pemilik rumah beserta peralatan yang digunakan untuk memproduksi sabu-sabu, lanjut dia, pihak BNN juga berhasil menemukan barang yang dicar BNN, yakni sabu-sabu. Setelah melakukan pengeledahan hingga Senin dini hari, kata Indra, pihak BNN menemukan sabu yang disembunyikan pelaku di dalam rumah.

"Yang ditemukan (sabu, Red) yakni sebesar 5,4 gram yang sudah dibungkus dalam satu paket. Sementara yang terdapat baru itu. Kami masih melakukan pendataan di TKP," ungkap Indra seraya mengatakan pihaknya tidak dapat berbicara banyak karena penggerebekan itu dipimpin langsung oleh BNN. (zsm)

HARI INI
11.30 WIB
KOMPAS TV

WARGA KEMBALI KESAL

BEBERAPA titik jalan di Kabupaten Bandung, masih belum mengalami perbaikan. Padahal Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bandung menjanjikan perbaikan jalan akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni. Rahayu (24), warga kompleks Graha Sari Endah, RT 1/26, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, menilai perbaikan jalan di Kabupaten Bandung ini lambat. Di beberapa titik, ujarnya, sudah terpasang spanduk dari Dinas PU Bina Marga bahwa jalan akan segera diperbaiki.

HALAMAN 10

Persib Mania



Puji Kerja Sama Sergio

PERSIB Bandung sukses melakukan revans kala menjamu Persisam Putra Samarinda di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/6) sore. Di putaran pertama, Persib kalah dari Persisam 1-2. Kemudian di putaran dua, Maung Bandung menang 4-1.

HALAMAN 24

Edi Siswadi Tersangka Suap

Dada Siap Bantu KPK

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Edi Siswadi, sebagai tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tedjocahyono. KPK juga menetapkan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Diduga, Edi bersama Dada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim Setyabudi terkait pengurusan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung. "Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Bandung, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Disimpulkan, ES (Edi Siswadi) selaku Sekda Bandung sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (1/7). Menurut Johan, Edi disangka me-

langgar Pasal 6 Ayat 1 huruf a, atau Pasal 5 Ayat 1, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Adapun Pasal 6 Ayat 1 yang memuat hukuman paling berat, berbunyi, dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta, setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang

diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili. Menurut Johan, penetapan Edi sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan penyuapan kepada hakim PN Bandung Setyabudi Tedjocahyono yang menjabat Ketua Gasibu Padjadjaran Toto Hutagalung, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan

ke halaman 11

...penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Disimpulkan, ES (Edi Siswadi) selaku Sekda Bandung sebagai tersangka.

JOHAN BUDI, Juru Bicara KPK

Rekonstruksi Digelar Tiga Hari

KASUS suap Hakim Tipikor Bandung, Setyabudi Tedjocahyono memasuki babak baru. Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan menggelar rekonstruksi kasus tersebut selama tiga hari yakni, Rabu, Kamis, Jumat (3-4-5/7). "Memang benar akan ada rekonstruksi kasus suap terhadap Pak Setyabudi, suratnya baru saja kami

terima dari KPK," kata Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Djoko Indriarto di PN Bandung, Senin (1/7). Djoko mengatakan, surat KPK itu hanya menyebutkan tanggal pelaksanaan rekonstruksi yakni tanggal 3, 4, dan 5 Juli 2013. Surat itu tidak

ke halaman 11



SETYABUDI TEDJOCAHYONO

Terlibat Suap Hakim
KPK menangkap tangan hakim Setyabudi Tedjocahyono, ketua majelis hakim kasus korupsi dana bansos Pemkot Bandung, saat menerima suap di kantornya di PN Bandung.

KPK memeriksa Edi Siswadi dan Dada Rosada secara terpisah untuk mengetahui swaran uang suap.

KPK kembali memeriksa Edi Siswadi dan Dada Rosada secara terpisah. Namun mereka keluar dari gedung KPK secara bersamaan.

KPK memeriksa Edi Siswadi. Edi mengaku diperintah Dada Rosada untuk menyuap hakim Setyabudi Tedjocahyono.

KPK menetapkan Edi Siswadi sebagai tersangka. Sebelumnya KPK menetapkan Dada Rosada sebagai tersangka kasus suap hakim Setyabudi Tedjocahyono.

Pabrik Sabu Beroperasi Dua Bulan

CIMAHI, TRIBUN - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama tim dari Satnarkoba Polres Cimahi, menggerebek sebuah rumah di kawasan kompleks perumahan Setraduta, Blok K 5 No 16 A, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,

Pasangan Suami Istri Dicidaduk

Minggu (30/6). Penyisiran bahkan berlangsung hingga Senin (1/7) dini hari. Rumah di kompleks perumahan mewah tersebut, diduga, menjadi

tempat produksi sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi, AKP Indra Sani, mengatakan, dalam penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan pasangan suami istri A dan S. Keduanya, kata dia,

ke halaman 11

Percaya Diri Tatap Piala Dunia

Brasil Juara Piala Konfederasi 2013

"O campeão voltou... ole... ole... (Juara lagi...ole...ole...)" Kerumunan pendukung Brasil terus menyanyikan lagu tersebut diiringi teriakan "ole...ole" usai Timnas Brasil memastikan gelar juara Piala Konfederasi 2013. Inilah kebangkitan negara tradisional sepakbola tersebut

setelah beberapa tahun tertidur.

Istimewanya, Tim Samba secara meyakinkan mengalahkan juara dunia 2010 sekaligus tim terbaik dunia, Spanyol, dengan skor cukup telak 3-0 pada laga final di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Senin (1/7) pagi.

Secara keseluruhan A Selecao dinilai sangat siap untuk mengikuti Piala Dunia 2014 yang bergulir 12 bulan mendatang. Kesiapan itu ditunjukkan Samba melalui kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Piala Konfederasi.

ke halaman 11

Novi Amelia Nyaris Buka Baju

JAKARTA, TRIBUN - Model seksi Novie Amelia alias Novi Amalia (26) berulah lagi. Model majalah dewasa tersebut tiba-tiba mengamuk saat menumpang ojek. Ia membuang tas beserta isinya, kemudian berusaha menanggalkan pakaiannya sehingga nyaris telanjang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (1/7) pagi.

Untungnya aksi nekat Novi diketahui seorang tukang ojek, kemudian mencoba menghentikan Novi dan segera membawanya ke Polsek Mampang. Dari Polsek Mampang, Novi dibawa ke Polres

Metro Jakarta Selatan, selanjutnya dijemput penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Dugaan, Novi kambuh akibat kecanduan narkoba.

"Saat itu Novi bertingkah sangat aneh saat melintas di daerah Mampang. Lalu ada tukang ojek yang melihat dan mengamankan Novi ke Polsek Mampang. Dan dari Polsek dibawa ke Polres," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Selatan, Kompol Timin Sugiyo.

"Kronologinya seperti apa, masih belum tahu. Masih simpang siur. Saat ini, Novi diamankan di Unit Pelayanan

Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan," kata Timin, kemarin siang. Berdasarkan pantauan TRIBUNnews.com, saat diamankan polisi, Novi terlihat meronta-ronta. Dia berupaya melucuti semua pakaiannya. Novi berada dalam dampungan polisi wanita.

"Novi keadaannya baik-baik saja. Dia memang sempat berteriak dan meronta. Tapi sekarang dalam keadaan baik," ucap Kasat Narkoba Polres Jaksel, Kompol Kus Subiantoro

ke halaman 11



NOVIE AMELIA

Pengusaha Merugi Rp 500 Juta

Tempat Hiburan Wajib Tutup Selama Ramadan

BANDUNG, TRIBUN - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung mengumpulkan pengusaha hiburan Kota Bandung di Hotel Horison Jl Pelajar Perjuangan 45, Kota Bandung, Senin (1/7). Para pengusaha hiburan wajib menutup tempat usahanya menjelang dan selama bulan suci Ramadan.

"Tempat hiburan di Kota Bandung ada 274 lokasi. Selama bulan puasa mulai h-2 sampai h+2 harus tutup," ujar Kepala

Disbudpar Kota Bandung, Herry Djuhari di Hotel Horison. Herry mengatakan, tempat hiburan yang wajib tutup di antaranya diskotek, pub, karaoke, panti pijat, biliar, sanggar seni dan mandi uap. "Tak hanya tempat hiburan, tapi hotel yang ada ada karaoke dan sauna harus tutup," ujar Herry.

Herry mengatakan, tempat hiburan harus tutup mulai 7 Juli sampai 11 Agustus 2013. Bagi yang tidak patuh akan terkena sanksi mulai teguran, pembekuan sampai pencabutan izin usaha. Sedangkan

restoran, menurut Herry, diminta tidak dibuka pada siang hari secara mencolok untuk menghormati orang yang berpuasa.

"Selama puasa dibentuk lima tim untuk pengawasan tempat hiburan. Jika ada tempat hiburan masih buka maka yang berhak bertindak Satpol PP sebagai penegak Perda," ujar Herry.

Herry berharap semua pengusaha patuh aturan karena tempat hiburan tutup sudah

ke halaman 11

Waspada Benjolan di Payudara Anda

Payudara yang indah adalah kebanggaan kaum hawa. Oleh sebab itu, tentu saja keindahannya a itu perlu dipelihara. termasuk kemulusannya. Ada benjolan di payudara Anda? Jangan anggap enteng, tapi jangan pula langsung panik. Mengapa demikian? Karena, kebanyakan benjolan yang muncul di payudara bukanlah kanker. Biasanya, hanyalah berupa perubahan fibrokistik. Apa itu fibrokistik? Istilah fibrokistik berasal dari kata fibrosis dan kista. Fibrosis adalah pembentukan jaringan

parut, sedangkan kista adalah kantong berisi cairan. Dengan demikian, perubahan fibrokistik itu dapat menyebabkan payudara Anda merasa nyeri. Dan hal ini seringkali terjadi sebelum periode menstruasi dimulai. Saat ini, payudara dapat saja terasa kenyal dan terkadang mengeluarkan cairan bening atau susu dari putingnya. Kendati demikian, dalam beberapa kasus benjolan itu perlu diteliti di bawah mikroskop, untuk memastikan apakah itu kanker atau bukan.

bersambung ke halaman 11

HARI BHAYANGKARA

Polisi Korban Teroris Itu Semringah

Oleh FIRMAN SURYAMAN

WALAU belum pulih benar, Aiptu Widartono, tampak turut hadir dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-67 di Mapolres Tasikmalaya Kota, Senin (1/7). Dengan mengenakan seragam lengkap anggota Polantas, korban penusukan terduga teroris di Pos Polisi Mitra Batik, beberapa waktu lalu, ini tampak semringah. "Sebenarnya saya masih belum bertugas karena belum pulih benar. Tapi sengaja datang karena ingin menghadiri Hari Bhayangkara," tutur Widartono saat berbincang dengan Tribun di ruang Satlantas. Walau masih dalam kondisi sakit, paras Widartono tampak sudah mulai segar. Di ruang Satlantas juga ada



JASAD TERDUGA TERORIS - Polisi dan petugas kesehatan mengangkat jasad terduga teroris di RS Sartika Asih, beberapa waktu lalu. Aiptu Widartono, yang menjadi korban penusukan terduga teroris itu, hadir dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-67 di Mapolres Tasikmalaya Kota, Senin (1/7).

Bripka Wahyu yang tengah duduk santai. Wahyu adalah teman satu kesatuan dengan korban sekaligus yang

menyelamatkan korban dari kebrutalan terduga teroris. Malam itu Wahyu bersama Widartono mengejar terduga

ke halaman 11

DIGITAL NEWSPAPER

Gosipi
Kartika Putri Diperiksa Polisi

http://digital.tribunjabar.co.id

Akhirnya Pakai Rompi Oranye

■ DADA DITAHAN KPK DI RUTAN CIPINANG

JAKARTA, TRIBUN ■ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Kota Bandung Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyisipan kepala hakim Syahbudi Tojocabryana terkait dugaan penyelewengan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung. "Ditahan selama 21 hari pertama di Cipinang," kata Juru Bicara KPK, Johas Budi, kemarin.

Penahanan dilakukan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap tersebut. Dada ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka selama lebih kurang tujuh jam.

Dia keluar dari Gedung KPK dan masuk ke mobil tahanan sekitar pukul 16.40. Saat keluar dari Gedung KPK, Dada tampak mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye. Ia tidak berkomentar seputar penahannya. ■

"Nanti, nanti, pada saatnya," ujar Dada sambil membusungkan bahunya warlawanan.

Dada pun sempat mengangkat kedua tangannya seiras dada seolah menolak rentetan pertanyaan wartawan yang diajukan kepadanya.

Saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, kemarin pagi, Dada mengaku siap ditahan.

Orang nomor satu di Bandung ini juga

■ ke halaman 11

Minta Penangguhan Penahanan



WAKIL Wali Kota Bandung, Aji Vianandi, meminta sangat prihatin atas penahanan Wakil Kota Dada Rosada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan Cipinang, Senin (19/8). Aji berharap KPK bisa menangguk penahanan Dada. "KPK bisa menangguk penahanan untuk sementara waktu dengan pertimbangan hukum bahwa Pak Dada selama ini bersikap kooperatif dalam pemeriksaan sehingga yang bersangkutan bisa akan mempersulit pemeriksaan," ujar Aji saat dihubungi kemarin.

Menurut Aji, penangguhan juga bisa dilakukan dengan alasan kemanusiaan karena yang bersangkutan telah menjadi urtuk Kota Bandung, Aji

■ ke halaman 11

LANGSUNG DITAHAN - Wakil Kota Bandung Dada Rosada ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai diperiksa KPK selama 7 jam di Kantor KPK, Jakarta, Senin (19/8). Dada yang diduga terlibat korupsi dana bantuan sosial di Pemkot Bandung tersebut ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.



Akhirnya Pakai Rompi Oranye

■ dari halaman 1

membantah dikabarkan menghilang saat dipanggil KPK pada Jumat (16/8).

Saat tiba di Gedung KPK, Dada sempat bersalaman dengan beberapa anak buahnya yang juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Mereka yang diperiksa adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Yosi Irianto, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, dan Kepala Badan Perizinan Terpadu Kota Bandung Dandan Riza Wardana.

Ditemui wartawan di Kantor KPK, Jakarta, pengacara Dada Rosada, Abidin, menyatakan, Dada siap membongkar keterlibatan hakim lain dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara banjos Pemerintah Kota Bandung yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

"Tak Dada siap kooperatif. Nanti akan dia sampaikan tiga hal yang dilihat sendiri, dialami sendiri, didengar sendiri. Soal hakim lain, dia akan menyampaikan apa adanya, tidak bermaksud menyalahkan orang lain," kata Abidin.

Tentang penahanan, Abidin mengaku sudah berkoordinasi

si dengan kliennya. Dia mengatakan Dada sudah memahaminya. "Dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum," ujarnya.

Setiap konsultasi, kata Abidin, Dada sudah menceritakan apa yang diketahuinya. Yang jelas, yang meminta uang untuk diberikan kepada hakim adalah terdakwa Toto Hutagalung. Dia mengklaim, Dada tidak pernah memberikan uang suap ke siapa pun.

"Awalnya minta Rp 5 miliar. Pak Dada tanya siapa itu yang minta. Tanyanya X. Saya sebut X saja. Itu permintaan dari hakim lainnya. Setelah itu Pak Toto sudah koordinasi di bawah," ujarnya.

Menurut dia, tidak ada fakta pengumpulan uang dari kepala dinas (kadis) se-SKPD Kota Bandung. Awalnya, tuhur dia, Totolah yang meminta ke satu kadis. Tapi dijawab harus atas izin Dada. Di sisi lain, kliennya tidak pernah menyetujui permintaan uang tersebut. Dia menambahkan, tidak melihat fakta bahwakhennya memberikan kartu kredit untuk terdakwa Toto. "Tidak ada fakta itu," ujarnya.

Sedianya, pekan lalu Dada diperiksa sebagai tersangka bersamaan dengan pemeriksaan mantan sekretaris daerah Pemkot Edi Siswardi. Namun, Dada berhalangan hadir dengan alasan meng-

ikuti rapat paripurna di DPRD di Bandung. Adapun Edi langsung ditahan sesuai diperiksa Jumat pekan lalu.

Dalam kasus ini, Dada dan Edi diduga bersama-sama menyuap Setyabudi Tejocahyono. KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap. Lembaga antikorupsi itu pun

lebih dulu menjerat orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto. Kini, KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut yang memungkinkan adanya tersangka baru. (tribunnews/edf)

Minta Penangguhan Penahanan

■ dari halaman 1

mengatakan Dada hanya tinggal sebulan lagi menjabat dan sudah dijadwalkan serah terima jabatan dan politikan kepada wali kota terpilih 2013/2018. "Bekas kami."

"Mudah-mudahan penangguhan, bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan," kata Aji.

Aji mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Namun pihaknya pun akan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. "Pemkot akan memberikan bantuan hukum yang memadai," ujar Aji.

Menurut pertaunan Tribun di rumah kediaman Dada Rosada di Jalan Tirtasari II no 21 Bandung, hingga pukul 21.00, tak ada pihak keluarga yang mau memberikan keterangan.

Meski terlihat ada keluarga yang berada di rumah, tak seorang pun mau memberikan keterangan. Mereka bingung. Sejak magrib ada beberapa tamu, termasuk tetangga yang masuk ke rumah Dada, tapi mereka pun sama, enggan buka mulut. Hanya melampiaskan suasan kepada wartawan yang berhumor di depan rumah Dada sejak sore.

"Wah, saya enggak tahu. Enggak, Enggak tahu," ujar seorang pria yang sempat diburu wartawan saat hendak masuk ke rumah Dada dan ditanya perihal keluarga Dada. Di depan rumah Dada, beberapa mobil tampak berjajar. Di halaman rumah terparkir tiga mobil yang diketahui milik wali kota yang menjabat selama dua periode ini. (tam/dic)

BANDUNG



DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada

■ Untuk Hadiri Pelantikan
Wali Kota Terpilih



“Nanti dipelajari dulu suratnya, sejauh mana pentingnya kehadiran DR di acara itu. Nanti dari hasil analisis, baru disampaikan.”

JOHAN BUDI
Juru Bicara KPK

kata Erwan saat ditemui sesuai peringatan satu abad Paguyuban Pasundan di Sasana Budaya Ganesha, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (20/8).

Menurut Erwan, surat tersebut diajukan ke KPK sekaligus untuk meminjam Wali Kota Bandung Dada Rosada agar diizinkan untuk menghadiri pelantikan pasangan wali kota dan wakil wali kota Bandung terpilih, Ridwan Kamil dan Oded Daniah.

BANDUNG,
TRIBUN - Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan mengaku telah mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemberitahuan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengadakan serah terima jabatan dan pelantikan wali kota Bandung periode 2013-2018.

“Saya telah membuat surat ke KPK bahwa kita akan melaksanakan serah terima jabatan wali kota 16 September 2013 ini. Suratnya sudah dikirimkan kemarin,”

DPRD Minta KPK Pinjamkan Dada

■ dari halaman 1

"Saya akan berusaha untuk meminjam Pak Dada ke KPK supaya pada saat pelantikan Pak Dada bisa hadir. Ya, mudah-mudahan bisa ditanggukhan (penahanan)," tuturnya.

KPK menahan Dada Rosada di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Senin (19/8). Dada merupakan tersangka kasus dugaan penyuapan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono terkait dengan penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK belum akan memberikan keputusan apakah akan memberikan izin atau tidak, kepada Dada. "Nanti dipelajari dulu suratnya, sejauh mana pentingnya kehadiran DR di acara itu. Nanti dari hasil analisis, baru disampaikan," kata Johan di kantor KPK, kemarin.

Sejauh ini, kata Johan, KPK belum menerima surat permohonan tersebut. Karena itu, KPK akan menunggu terlebih dahulu. "Sepanjang tingkat kepentingannya tidak wajib, tentu ditolak," katanya.

Pascapenahanan Dada, suasana lingkungan Pemerintah Kota Bandung tak berbeda dengan hari sebelumnya. "Semua kegiatan tak ada yang terganggu baik yang ada di lingkungan Balai Kota maupun di luar Balai Kota," ujar Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Disinkom) Kota Bandung Bulgan Alamin, kemarin.

Walau begitu, para PNS di jajaran Pemkot terlihat prihatin. Ini terlihat dari pembicaraan dan status Blackberry yang hampir semuanya menyampaikan keprihatinan.

Kepala Seksi Pemberitaan Meiwani Kartiwa mengaku sangat terpukul dan merasa kehilangan karena setiap harinya selalu bersama. "Mudah-mudahan Pak Dada tabah menerima cobaan," ujar Meiwani, yang selalu meliput kegiatan Dada baik siang

maupun malam.

Rasa prihatin juga disampaikan salah satu staf Sekretaris Pribadi Wali Kota, Nandang. "Sedih saat tahu Bapak ditahan, pas nonton TV. Bagaimanapun juga beliau atasan saya," ujar Nandang, yang sudah menjadi staf selama dua tahun.

"Pak Dada dekat dengan karyawan, hafal nama-nama staf di sini. Ya, suka nyapa saya," ujar Nandang, yang berharap keluarga Dada dikuatkan dan diberi kesabaran.

Ketua PN di Ujung Tanduk

Mahkamah Agung (MA) menyerahkan seluruh proses hukum para hakim yang disebut oleh mantan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi ke KPK. Termasuk juga Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso yang disebut menerima suap dari Dada Rosada.

"Bila ada hakim atau oknum pengadilan yang diduga dan terbukti korupsi, MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur, saat berbincang dengan *detikcom*, kemarin.

Singgih disebut menerima uang suap dari Dada Rosada dan Edi Siswadi melalui Toto Hutagalung yang diserahkan pada terdakwa Setyabudi Tejocahyono. Dalam dakwaan Setyabudi, jaksa menyebut Singgih mendapat jatah US\$ 15 ribu, sementara dua anggota majelis hakim perkara korupsi bansos, yaitu Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, mendapat masing-masing US\$ 18.300.

"Apalagi ini sudah disebut di dakwaan. MA komitmen bekerja sama memberantas korupsi di semua aspek," kata Ridwan.

Desakan pengusutan hakim selain Setyabudi juga diungkapkan Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Hukum dan Publik, Erlan Jaya Putra SH MH. "Menurut pengakuan Setyabudi yang disampaikan oleh jaksa itu kan cukup jelas siapa saja nama-nama hakim yang telah menerima uang itu. Mengapa hakim-hakim itu

tidak segera diusut dan dijadikan tersangka?" kata Erlan.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (15/8), terungkap pengakuan Setyabudi kepada penyidik KPK bahwa uang yang diterimanya dari Toto Hutagalung sebesar Rp 1,8 miliar itu sebagian di antaranya diserahkan kepada dua hakim anggota yang menyidangkan kasus bansos, yakni Ramlan Comel dan Djodjo Djohari.

Baik Ramlan Comel maupun Djodjo Djohari hingga kemarin enggan menjawab pertanyaan *Tribun* tentang tuduhan bahwa keduanya telah menerima uang suap dari Toto Hutagalung yang diserahkan oleh Setyabudi. (tsm/san/kompas.com)



MALAM MINGGU
MIKO
MALAM INI
19.00 WIB

KOMPASTV

HARIAN PAGI

Tribun Jabar

SPIRIT GENERASI BARU

IKLAN: 022-7530666 *Hunting*

SABTU, 7 SEPTEMBER 2013 ■ NO. 4856 TAHUN XIV

pesta
keuntungan
2013

BURUAN ISI ULANG!
Raih **Ford FIESTA**
& Miliaran hadiah lainnya!

Kumpulkan kartunya dengan
mengisi kartu Asuransi SIMPATI Fiesta

18 HONDA VARO
18 IPHONE 4
18 LOGAM
18 KAMLING
18 TV LED

Sejuta hiburan dari
80 saluran



Nikmati up to **59** channel

Pause, Rewind & Play
acara favorit Anda



www.800

www.tribunnews.com

Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Wali kota Bandung Dada Rosada, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap hakim Setyabudi Tejocahyono. Dada ditahan untuk 40 hari ke depan terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.

"Diperpanjang (penahanannya)," kata Dada saat menjawab pertanyaan wartawan setelah diperiksa penyidik KPK, Jumat (6/9).

Dada tak pernah bicara akan membuka aliran banaga

ABIDIN

Penasihat Hukum Dada Rosada

Menurut jadwal pemeriksaan KPK, Dada kemarin diperiksa sebagai tersangka. Mengesakan rompi tahanan, Dada masuk ke gedung pukul 10.33. Sekitar setengah jam kemudian, ia keluar.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, menegaskan perpanjangan masa penahanan itu. Menurut dia, per-

panjang dilakukan per 6 September 2013. "Besarnya terdapat tersangka DR (Dada Rosada, Red) diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan," katanya.

Dada resmi ditahan di Rutan Cipinang pada 19 Agustus lalu. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan pengurusan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung bersama mantan sekretaris daerah Bandung, Edi Siswadi. KPK menjerat mereka dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No-

BERITA INI BISA DIBACA DI:

www.tribunnews.com

» ke halaman 7



TRIBUNNEWS/DARY PERMANA

DIPERPANJANG - Wali Kota Bandung Dada Rosada melambaikan tangan saat memasuki kendaraan usai menandatangani perpanjangan masa penahanan oleh KPK di Jakarta, Jumat (6/9). Dada diperpanjang masa tahanannya hingga 40 hari mendatang agar KPK dapat lebih mendalami kasus yang melibatkannya.

Penahanan Dada Diperpanjang 40 Hari

■ dari halaman 1

mor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Kemarin, KPK kembali memanggil Dada sebagai tersangka. Selain Dada, penyidik memanggil seorang PNS Pemerintah Kota Bandung, Rochman, yang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas para tersangka kasus tersebut.

"Rochman diperiksa sebagai saksi," kata Priharsa. Disinyalir, pemeriksaan Rochman dilakukan guna menelisik lebih jauh urusan dana yang diduga diberikan kepada Setyabudi.

Dihubungi via telepon, penasihat hukum Dada, Abidin, mengatakan, perpanjangan

penahanan Dada dilakukan karena keterangannya masih dibutuhkan. "Perpanjangan itu hak KPK, mungkin karena keterangan Pak Dada masih dibutuhkan," ujar Abidin saat dihubungi *Tribun* kemarin.

Sebagai penasihat hukum, ia sudah mengajukan hak-hak Dada, di antaranya pemeriksaan kesehatan dan penangguhan tahanan. "Penangguhan tahanan sudah diajukan oleh berbagai elemen tidak hanya dari Dada dan keluarganya, tapi juga ormas Islam, alim ulama, LSM, tokoh masyarakat, Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, dan jelas dari tim penasihat hukum sudah mengajukan. Namun belum ada balasan dari KPK," ujar Abidin.

Rencananya, Abidin akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap KPK sekaligus menyerahkan surat undangan pelantikan wali kota Bandung terpilih, serah terima jabatan

dan acara pisah sambut. "Ada surat permohonan agar Dada diizinkan mengikuti rangkaian acara serah terima jabatan dan pisah sambut dan surat undangan untuk KPK," ujar Abidin.

Abidin pun menyampaikan pesan Dada yang mempertanyakan berita tentang pernyataan Dada yang akan buka-bukaan masalah dana bantuan sosial, khususnya aliran dana bansos ke dewan.

"Pak Dada tak pernah bicara akan membuka masalah aliran bansos, apalagi ke anggota dewan, karena kasus yang dihadapi Dada ini kasus suap," ujar Abidin.

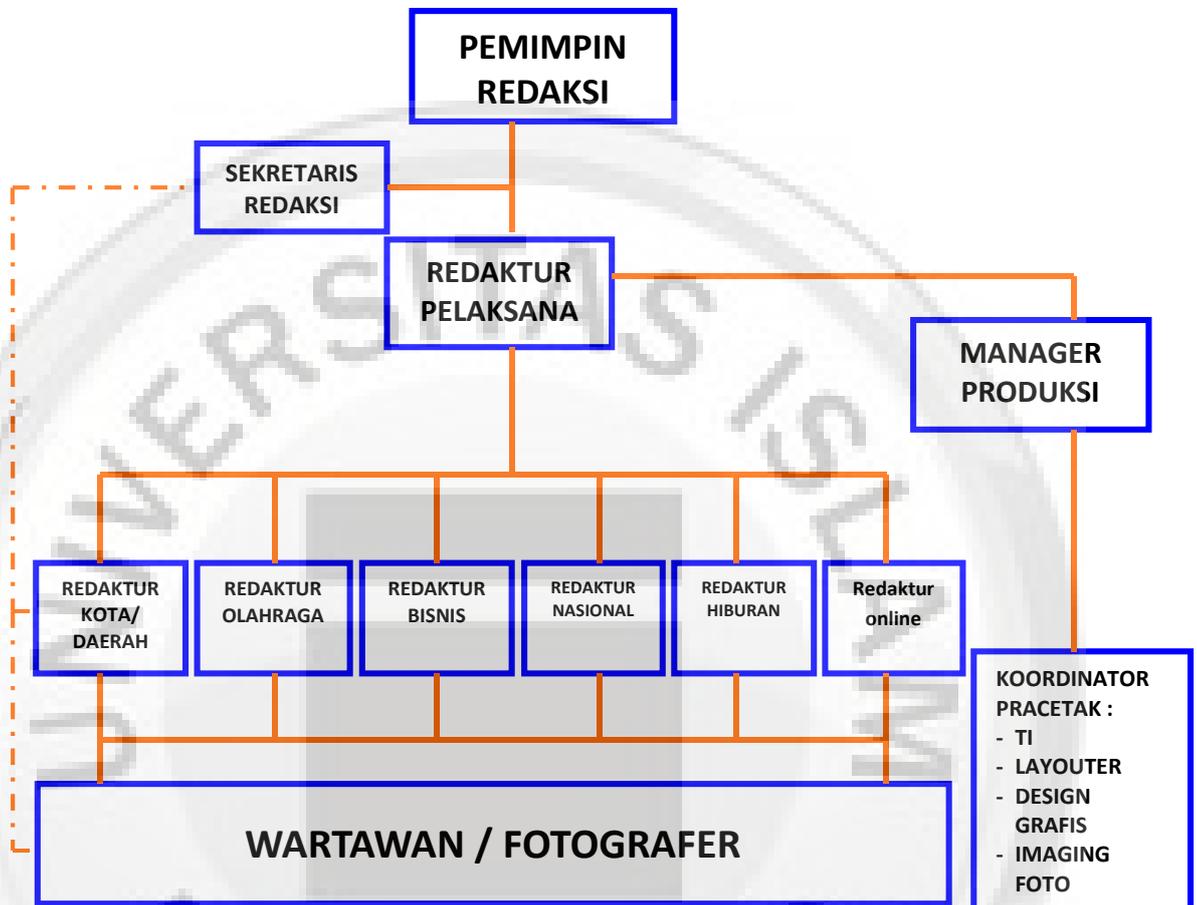
Menurut Abidin, dalam pemeriksaan di KPK tak ada pertanyaan masalah aliran bansos, baik dalam BAP maupun kepada wartawan. "Pak Dada tak pernah bicara akan membuka aliran bansos," ujar Abidin. (tribunnews.com/edf/tsm)

STRUKTUR ORGANISASI HARIAN UMUM PIKIRAN RAKYAT

- **PEMIMPIN UMUM:** Joko Hendrarto
- **PEMIMPIN REDAKSI/Penanggung Jawab:** H. Budhiana Kartawijaya
- **DIREKTUR UTAMA:** Joko Hendrarto
- **DIREKTUR OPERASIONAL:** Januar Arifin Kosasih
- **DIREKTUR BISNIS:** H. Windu Djajadiredja
- **SEKRETARIS PERUSAHAAN:** H. Asep S. Bakri
- **HUMAS:** H. Suherlan
- **IKLAN:** H. Syarief Hidayat
- **SIRKULASI:** Teguh Laksana
- **MARKETING COMMUNICATION:** Refa Riana
- **KEUANGAN:** H. Sofyan Apandi
- **AKUNTANSI:** H. Tubagus Hidayatullah
- **SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL:** H. Erick Parikesit
- **UMUM:** H. Wawan Djuwarna
- **PRODUKSI:** H. Kartono Sarkim
- **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:** H. Mirza Zulhadi
- **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN:** Haris Darmawan
- **SUMBER DAYA MANUSIA:** Agus Thanjung Wangsatmadja

(Sumber : **Pikiran Rakyat, 2014**)

STRUKTUR ORGANISASI SURAT KABAR TRIBUN JABAR



Direktur Utama : Herman Darmo
Pemimpin Umum : Herman Darmo
Wakil : H Pitoyo

Pimpinan Perusahaan : H Pitoyo
Pjs. Manajer Keuangan : Supriadi Sembiring
Manajer PSDM/Umum : Bernadeta Tri Cahya Dewi
Manajer Iklan : Rahmi Khasya Sarini
Manajer Sirkulasi Plt : Iwan Setiawan

Redaksi

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Cecep Burdansyah
Redaktur Pelaksana : Januar Pribadi Hamel
Manajer Produksi : Machmud Mubarok
Koordinator Liputan : Kander Turnip

Redaktur :

- Adityas Annas Azhari
- Arief Permadi
- Darajat Arianto
- Deni Ahmad Fajar
- Ferri Amiril Mukminin
- Hermawan Aksan
- Kisdiantoro
- Sugiri UA
- Sujarwo

Staf Redaksi :

- Agung Yulianto Wibowo
- Dedy Herdiana
- Deny Budiman
- Dicky Fadiar Djuhud
- Erwin Adriansyah
- Ida Romlah
- Ichsan
- Kemal Setia Permana
- Mega Nugraha
- M Zezen Zainal Muttaqin
- Siti Fatimah
- Teuku M Guci Syaifuddin
- Tiah SM
- Taufiq Ismail

Fotografer:

- Deni Denaswara
- Gani Kurniawan
- Zelphi

Daerah :

- Tarsisius Sutomonaio (Cirebon)
- M Syarif Abdussalam (Garut)
- Andri M Dani (Ciamis)
- Deddi Rustandi (Sumedang)
- Firman Suryaman (Tasikmalaya)

Artistik : Wahyudi Utomo

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Diri

Nama Lengkap : Dieni Nurdianingsih
NPM : 10080010266
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 6 Oktober 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Cipada No. 22 RT/RW: 04/03
Sumedang
Telp. : ☎ 08987017793
E-mail : dieninurdianingsih@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2010- sekarang : Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi/
Jurnalistik Universitas Islam Bandung
2007-2010 : SMAN 1 Sumedang
2004-2007 : SMPN 1 Sumedang
1998-2004 : SDN Pakuwon 1 Sumedang